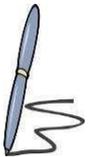
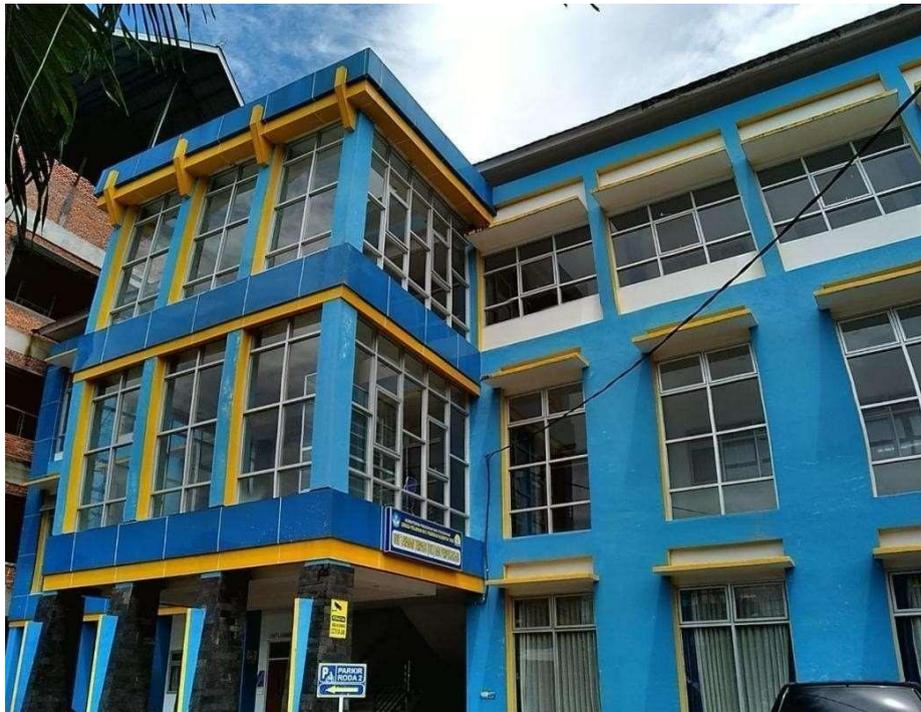




**RENCANA STRATEGIS
BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2020–
2024**



**Tujuan, Indikator kinerja tujuan, Sasaran dan Indikator kinerja sasaran Arah
Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan dan Reformasi
Birokrasi Target**



Kinerja dan Kerangka Pendanaan

KATA PENGANTAR

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur merujuk kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Dikdas dan Dikmen tahun 2020–2024.

Rencana Strategis sebagai dokumen utama yang memuat kebijakan, tujuan, sasaran, dan program. Didalam tujuan dan sasaran memuat indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran, yang mendukung terlaksananya Penjaminan Mutu Pendidikan baik pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar maupun pendidikan menengah. Dokumen Rencana Strategis inilah yang menjadi salah satu pedoman pelaksanaan kinerja organisasi untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Rencana strategis ini lebih lanjut dijabarkan kedalam rencana kinerja atau program kerja tahunan dan menjadi rujukan untuk mengevaluasi capaian program dan kegiatan dalam periode lima tahun.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan kebijakan dari Kementerian, rencana strategis senantiasa perlu direviu secara periodik, untuk disempurnakan dan dilakukan perubahan-perubahan yang diperlukan. Perubahan-perubahan ini terkait dengan kebijakan internal dan capaian target tahunan dalam bidang Penjaminan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Dalam mereviu rencana strategis ini diperlukan keterlibatan semua ekosistem pendidikan baik internal maupun eksternal untuk perbaikan dalam mencapai visi dan misi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur.

Samarinda, 29 April 2022

Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan



Dr. Khairuddin, S.Pd, M.Pd.

NIP. 197002011997021001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	5
A. KONDISI UMUM	5
1. Capaian Kinerja BPMP Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi (BPMP) Kalimantan Timur Tahun 2015-2019.....	7
a. Pemetaan Mutu Satuan Pendidikan.....	7
b. Supervisi Dan Fasilitasi Satuan Pendidikan.....	18
c. Data Pokok Kependidikan Di Provinsi Kalimantan Timur	21
d. Tata Kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan	23
2. Isu Strategis yang Berkembang	24
B. POTENSI DAN PERMASALAHAN.....	26
1. Potensi yang Dimiliki.....	26
2. Permasalahan yang Dihadapi.....	27
a. Peningkatan Jumlah Sekolah Yang Mencapai Kategori “SNP”	27
b. Tata Kelola dan Pelayanan Organisasi Perlu Terus Ditingkatkan Kualitasnya.....	28
c. Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman	28
BAB II TUJUAN DAN SASARAN BPMP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	31
A. TUJUAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA	31
B. TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN STRATEGIS.....	32
C. INDIKATOR KINERJA SASARAN	32
BAB III ARAH KEBIJAKAN STRATEGI KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	36
A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	36
B. STRATEGI PENINGKATAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN	37
C. KERANGKA REGULASI.....	38
D. KERANGKA KELEMBAGAAN	38
1. Struktur Kelembagaan.....	38
2. Sumber Daya Manusia	39
3. Tugas dan Fungsi LPMP	40
E. REFORMASI BIROKRASI.....	40
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	44

A. TARGET KINERJA	44
B. KERANGKA PENDANAAN.....	46
BAB V	50
PENUTUP	50
DAFTAR PUSTAKA.....	51
LAMPIRAN.....	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Pada hakikatnya pembangunan pendidikan merupakan upaya yang sistematis dan terencana untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Pembangunan pendidikan merupakan bagian integral dari pembangunan sektor-sektor lain. sehingga, penyusunan rencana pendidikan dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh unsur pembangunan yang terkait seperti kondisi sosial, politik, budaya dan lain sebagainya. Sejalan dengan pemikiran tersebut, penyusunan rencana strategis pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah tahun 2020-2024 memperhatikan hal-hal yang telah dicapai pada periode perencanaan sebelumnya (tahun 2015-2019) melalui evaluasi pelaksanaan yang seksama, mengkaji kendala-kendala yang dihadapi dan memperhatikan kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan dalam arti yang seluas-luasnya.

Tahapan penyusunan Rencana Strategis Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tahun 2020–2024. Rencana Strategis ini menghasilkan Rencana Strategis aplikatif bagi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur dan selanjutnya ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur. Pembahasan Rencana Strategis mencakup visi, misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis, termasuk target kinerja dan kerangka pendanaan. Pembahasan Rencana Strategis tersebut relevan dengan peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025, dijelaskan bahwa arah pembangunan untuk RPJMN ke-4 2020–2024 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan program prioritas meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Tema pembangunan Pendidikan menurut Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005–2025 diselaraskan dengan tema Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Berikut disajikan Tabel Tema Pembangunan Pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Tabel 1.1 Tema Pembangunan



Sejalan dengan amanat Konstitusi, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam Nawacita, berkaitan dengan pembangunan bidang pendidikan memberikan perhatian untuk (1) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, (2) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional (3) Melakukan revolusi karakter bangsa (4) Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Pengaturan operasional untuk mewujudkan nawa cita dan hak memperoleh pendidikan di jabarkan dalam Undang–Undang Nomor 20 tahun 2003, Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 dan peraturan turunan lainnya.

Sejalan dengan hal tersebut, selanjutnya kebijakan ini dijabarkan dalam kerangka pembangunan manusia Indonesia yang sehat, cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan bermartabat. Implementasinya yang akan diprogramkan oleh Kementerian dan Lembaga adalah terwujudnya (1) Layanan Dasar dan Perlindungan Sosial; (2) Produktivitas; dan (3) Pembangunan Karakter. Ketiga hal ini terkait dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Urusan layanan dasar menyangkut pendidikan, urusan produktivitas menyangkut pendidikan dan pelatihan vokasi dan pembangunan karakter menyangkut pendidikan keagamaan, pendidikan kewarganegaraan. Arah strategi nasional pembangunan pendidikan adalah Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas.

Oleh karena itu, sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi maka Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Rencana Strategis mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 pasal 2 bahwa renstra kemendikbudristek digunakan sebagai pedoman bagi unit eselon I, unit eselon II, perguruan tinggi negeri dan unit pelaksana teknis di lingkungan kemendikbudristek. Berdasarkan Peraturan Menteri di atas Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur menjabarkan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dalam Rencana Strategis Balai Penjaminan Mutu Pendidikan yang kemudian dijabarkan lagi ke dalam Rencana Kerja Tahunan.

Penyusunan Rencana strategis Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur tidak terlepas dari rencana strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah 2020–2024 dan hasil evaluasi Rencana Strategis tahun 2015-2019. Salah satu tugas pokok Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah berdasarkan Permendikbudristek Nomor 11 tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Dalam menjalankan tugas tersebut Balai Penjaminan Mutu Pendidikan di masing- masing provinsi, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, sehingga acuan dalam merumuskan arah kebijakan, sasaran, indikator kinerja, program dan indikator kinerja kegiatan (IKK) serta output Rencana Strategis Balai Penjaminan Mutu Pendidikan harus mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah 2020–2024.

1. Capaian Kinerja BPMP Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi (BPMP) Kalimantan Timur Tahun 2015-2019

Dalam periode Renstra Tahun 2015-2019, BPMP Kalimantan Timur (pada periode tersebut masih dikenal sebagai LPMP) telah melakukan pemetaan mutu satuan pendidikan berdasarkan 8 SNP, supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan dalam pencapaian 8 SNP serta peningkatan tata kelola di lingkungan BPMP Kalimantan Timur. Hasil pemetaan mutu, supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan sebagai capaian kinerja BPMP Kalimantan Timur selama periode Renstra 2015-2019 dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Pemetaan Mutu Satuan Pendidikan

Pemetaan mutu satuan pendidikan (Jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK) di Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan sejak tahun 2016–2019 melalui Aplikasi Pemetaan Mutu Pendidikan (PMP) yang dikembangkan oleh Satgas PMP Ditjen Dikdasmen. Instrumen PMP berisi penilaian terhadap indikator 8 standar nasional pendidikan



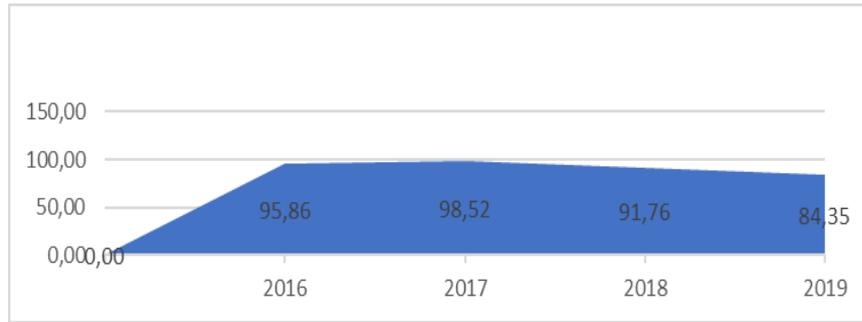
Gambar 1.1 Indikator Standar Nasional Pendidikan

Pengisian instrumen PMP dilakukan oleh sekolah (responden: kepala sekolah, guru, siswa, dan komite sekolah), divalidasi oleh pengawas sekolah dan dikawal oleh BPMP. Aplikasi PMP terintegrasi dengan Dapodik dan menghasilkan Rapor Mutu Sekolah yang berisi capaian mutu Satuan pendidikan berdasarkan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP). Berikut ini capaian mutu satuan pendidikan sejak tahun 2016-2019.

**Tabel 1.2 Progres Sekolah yang Telah Melakukan Pengisian Data Mutu
(Data PMPOnline 16 Oktober 2020)**

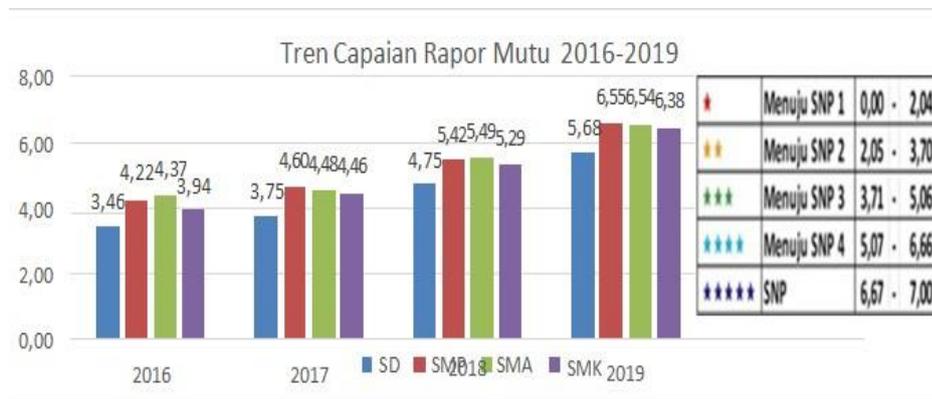
Sekolah	2016	2017	2018	2019
SD	1831	1867	1750	1625
SMP	599	626	580	559
SMA	210	215	191	169
SMK	209	220	206	154
Sekolah	2849	2928	2727	2507

Jumlah sekolah yang terpetakan mutunya rata rata telah mencapai 92,62% sekolah melakukan pengisian data mutu dalam rentang 2016–2019.



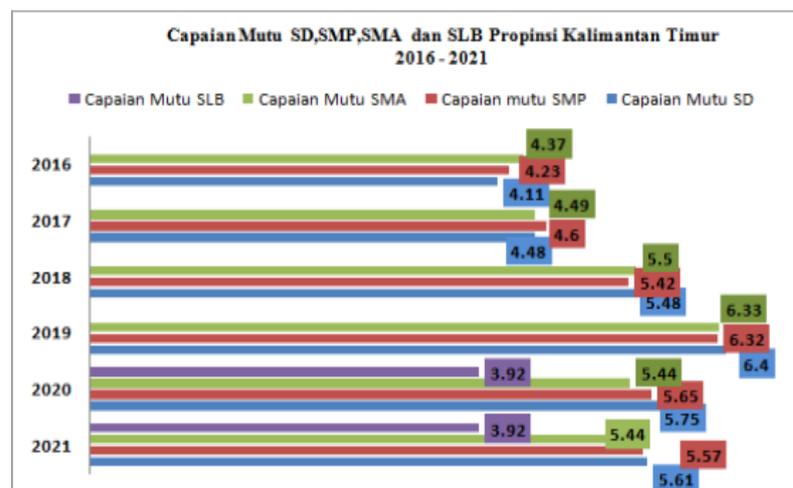
Gambar 1.2 Persentase sekolah yang Terpetakan Mutunya

Dari sekolah-sekolah yang telah terpetakan mutunya dapat dilihat tren capaian rapor mutu 2016–2019.

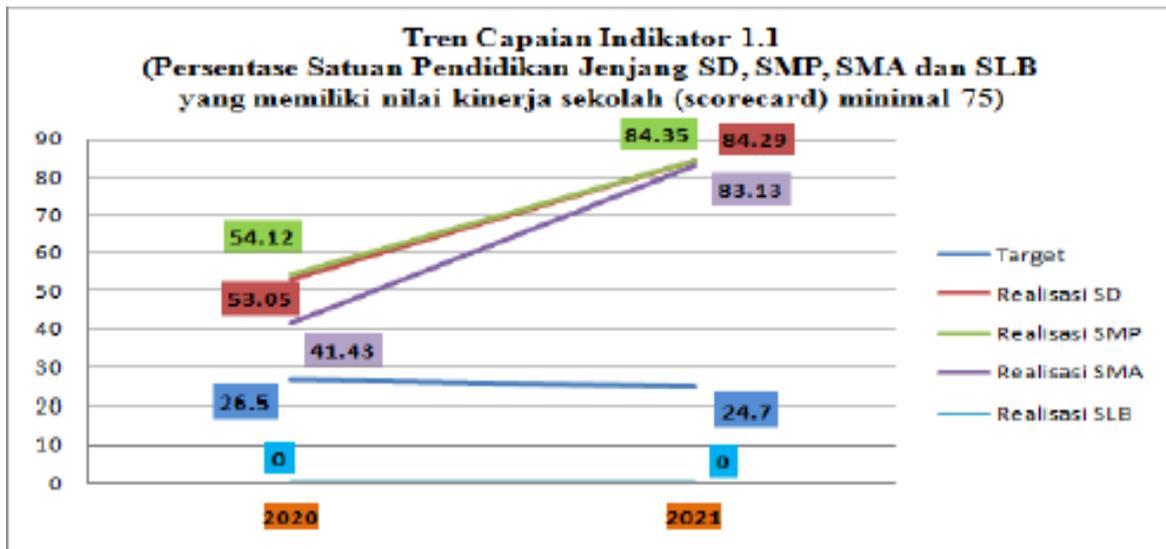


Gambar 1.2 Tren Capaian Rapor Mutu 2016 s.d 2019

Capaian SNP jenjang SD, SMP, SMA dan SMK menunjukkan adanya peningkatan capaian SNP dari tahun 2016 hingga 2019. Adapun Capaian Mutu Propinsi Kalimantan Timur 2016 – 2021 Berdasarkan Aplikasi PMP Online 2021.

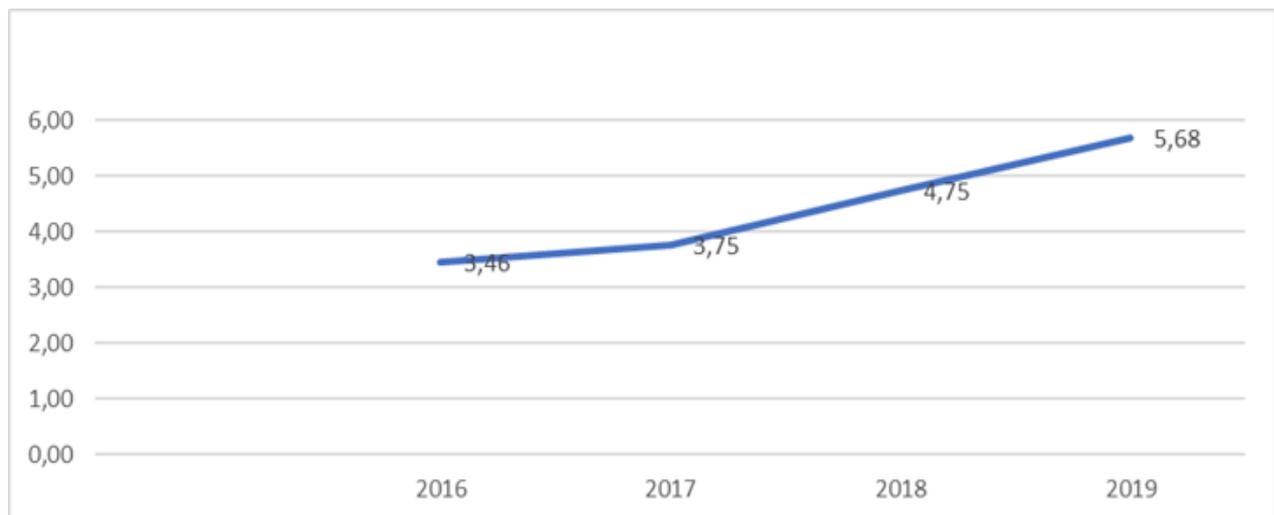


Gambar 1.3 Tren Capaian Rapor Mutu 2016 s.d 2021



Gambar 1.4 Capaian Kinerja Berdasarkan Nilai Kinerja Sekolah Diatas 75

1) Pemetaan Mutu Pendidikan Jenjang SD



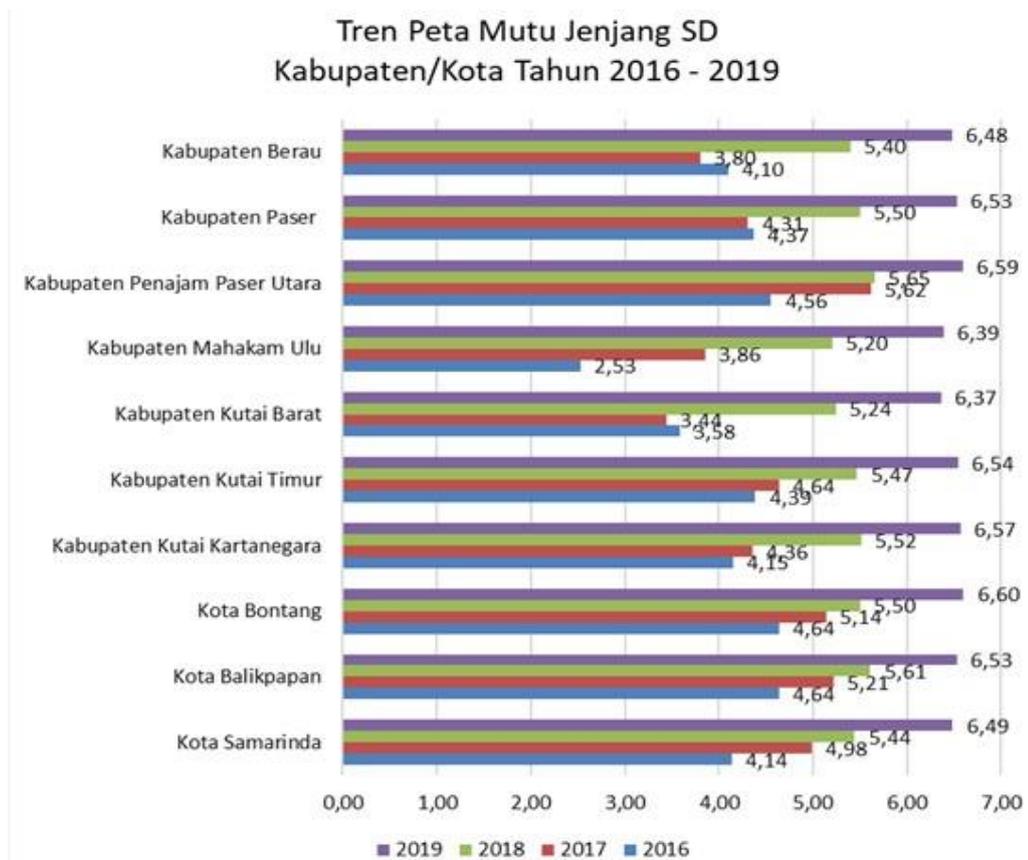
Gambar 1.5 Hasil Pemetaan Mutu Jenjang Pendidikan SD

Perbandingan capaian SNP jenjang SD menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2016 s.d. 2019.



Gambar 1.6 Tren Peta Mutu Pendidikan Jenjang SD

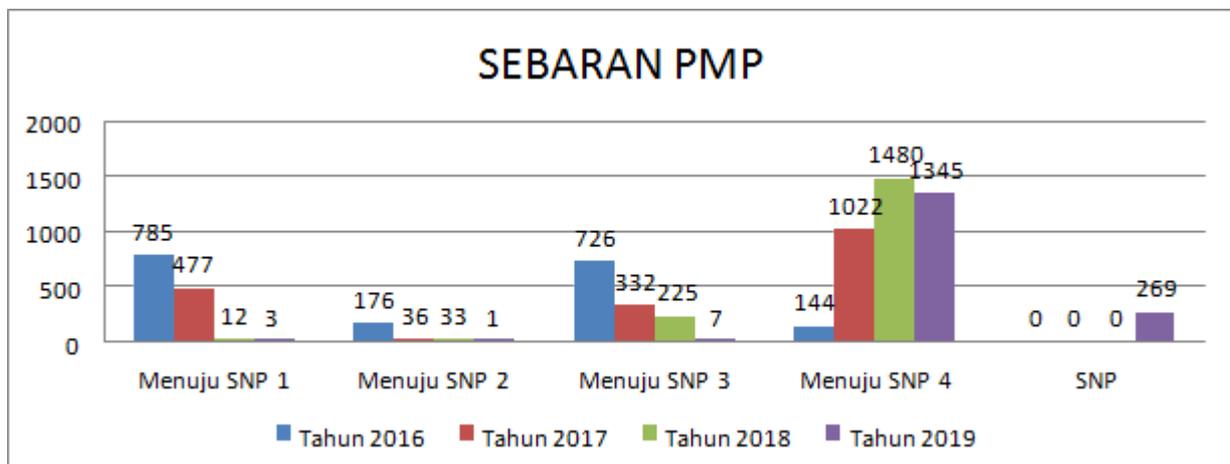
Jika dilihat secara lebih detail capaian untuk semua standar juga terlihat adanya peningkatan dari tahun 2016 s.d. 2019.



Gambar 1.7. Tren Peta Mutu Pendidikan Jenjang SD Kab/Kota

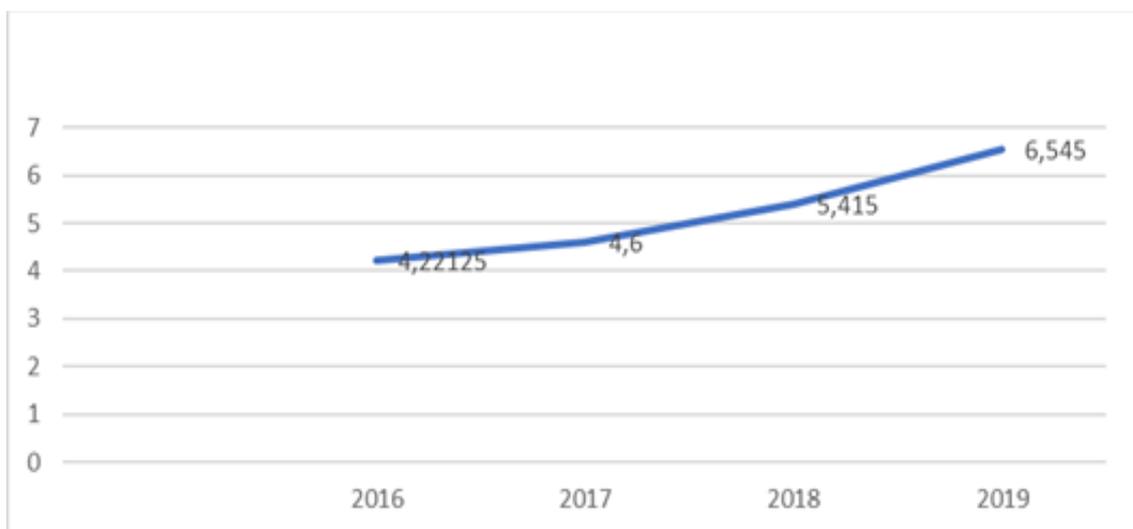
Mayoritas SD sebanyak 1350 sekolah dari 1625 sekolah yang mengirim data PMP Tahun 2019

berada pada kategori menuju SNP 4 dan ada 269 sekolah berada pada kategori SNP. Terdapat peningkatan capaian SNP yang ditunjukkan dengan berkurangnya jumlah sekolah yang berada pada kategori menuju SNP 1, SNP 2, SNP 3, dan SNP 4 disertai dengan peningkatan jumlah sekolah yang berada pada kategori SNP.



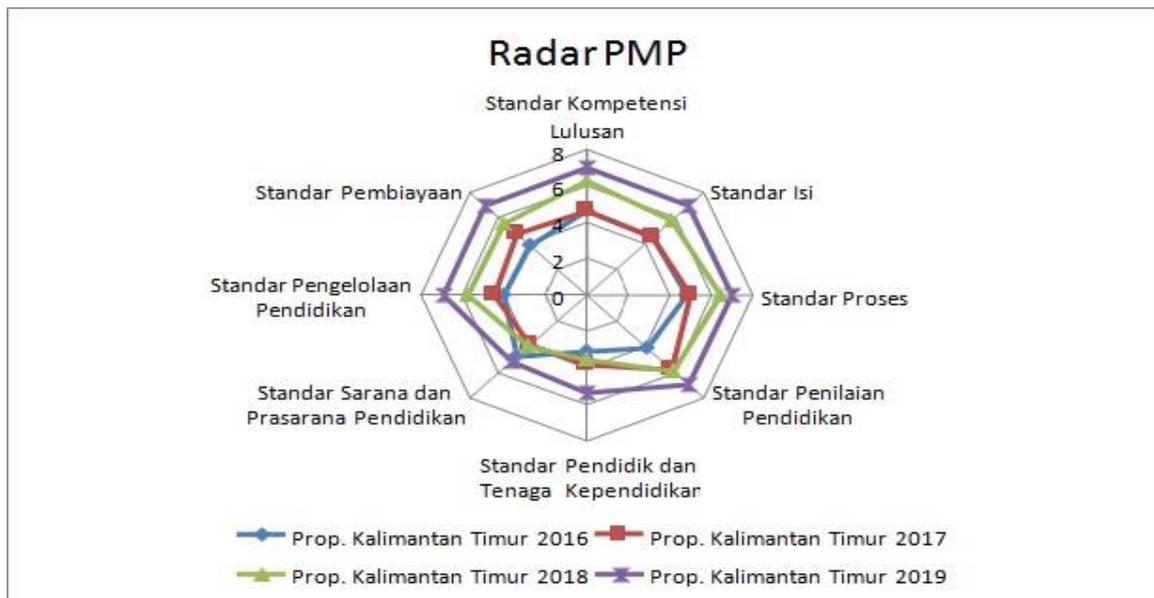
Gambar 1.8 Pemetaan Mutu Jenjang SD Berdasarkan Kategori Capaian SNP

2) Pemetaan Mutu Pendidikan Jenjang SMP



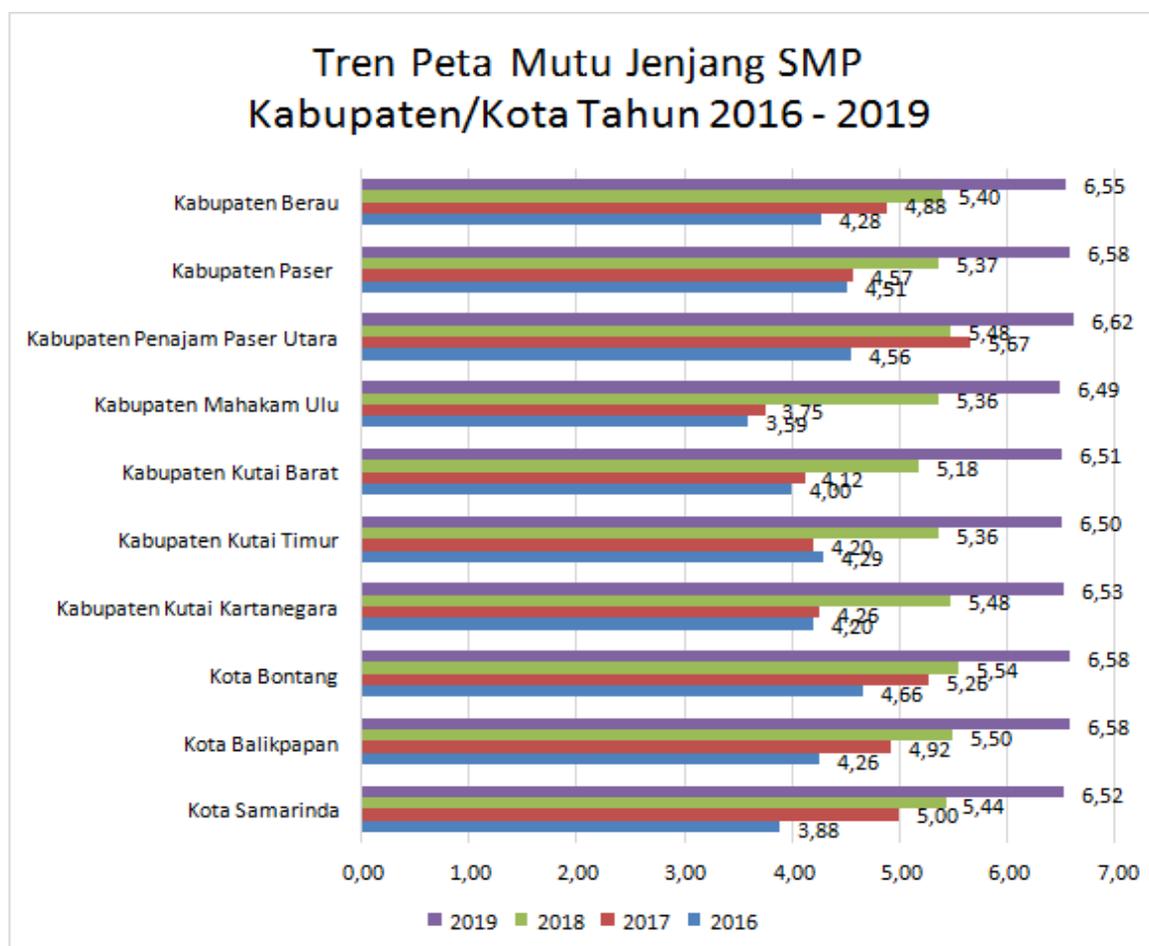
Gambar 1.9. Hasil Pemetaan Mutu Pendidikan Jenjang SMP

Perbandingan capaian SNP jenjang SMP menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2016 s.d 2019

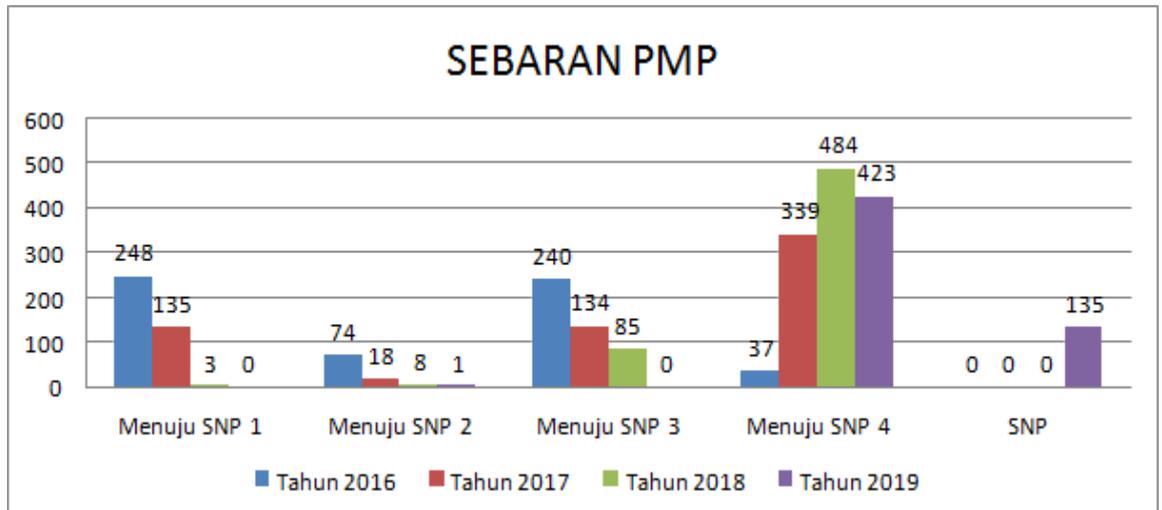


Gambar 1.10 Hasil Pemetaan Mutu Jenjang SMP

Jika dilihat secara lebih detail capaian untuk semua standar juga terlihat adanya peningkatan dari tahun 2016 s.d 2019.



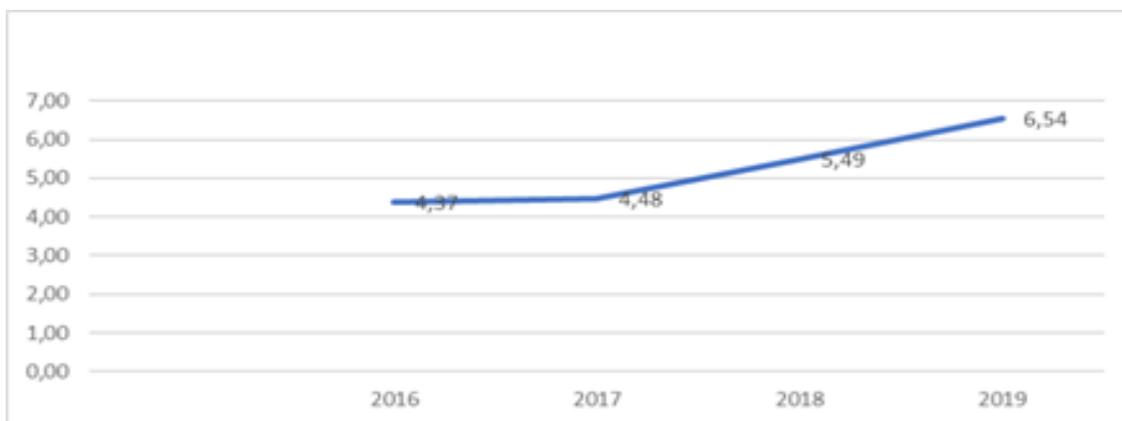
Gambar 1.11 Tren Peta Mutu Pendidikan Jenjang SMP



Gambar 1.12 Pemetaan Mutu Jenjang SMP Berdasarkan Kategori Capaian SNP

Mayoritas SMP sebanyak 423 sekolah dari 559 sekolah yang mengirim data PMP Tahun 2019 berada pada kategori menuju SNP 4 dan ada 135 sekolah berada pada kategori SNP. Terdapat peningkatan capaian SNP yang ditunjukkan dengan berkurangnya jumlah sekolah yang berada pada kategori menuju SNP1, SNP, SNP 3, dan SNP 4 disertai dengan peningkatan jumlah sekolah yang berada pada kategori SNP.

3) Pemetaan Mutu Pendidikan Jenjang SMA



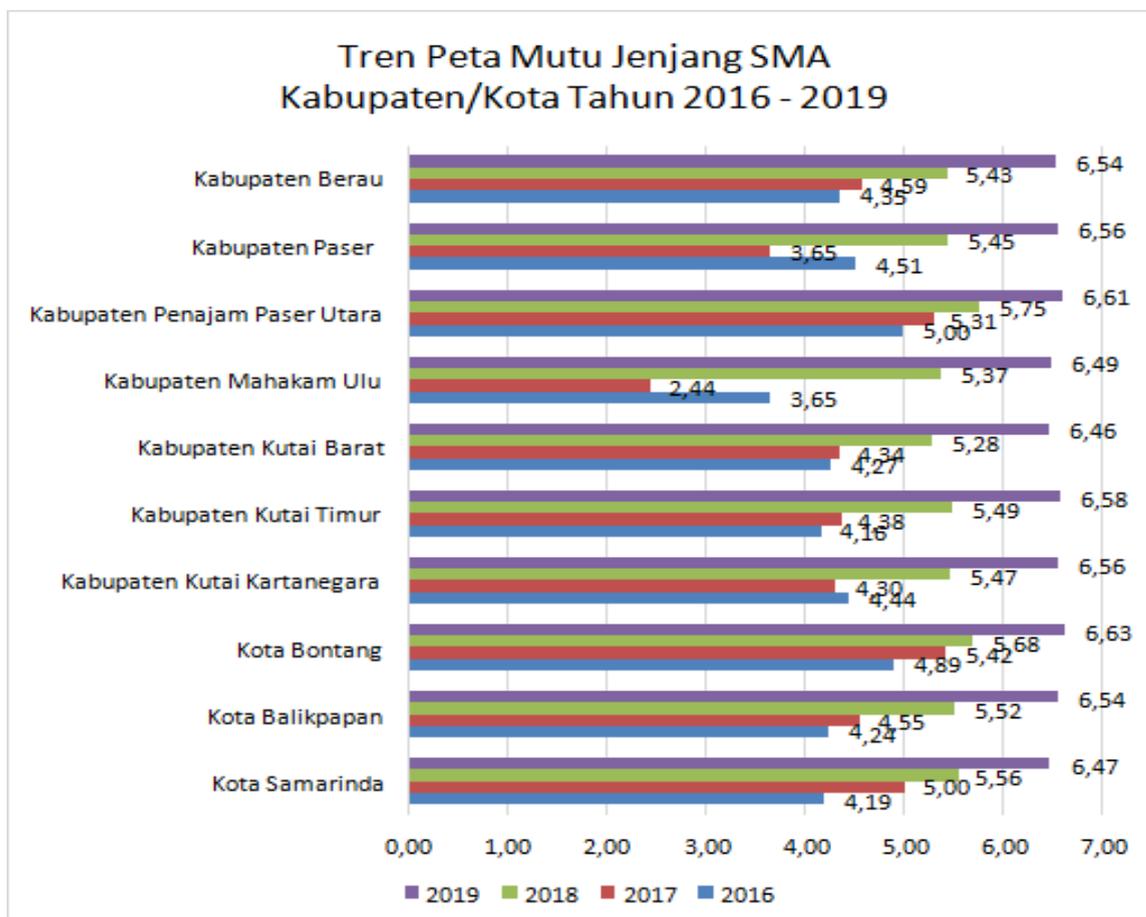
Gambar 1.13 Hasil Pemetaan Mutu Pendidikan Jenjang SMA

Perbandingan capaian SNP jenjang SMA menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2016 s.d tahun 2019.

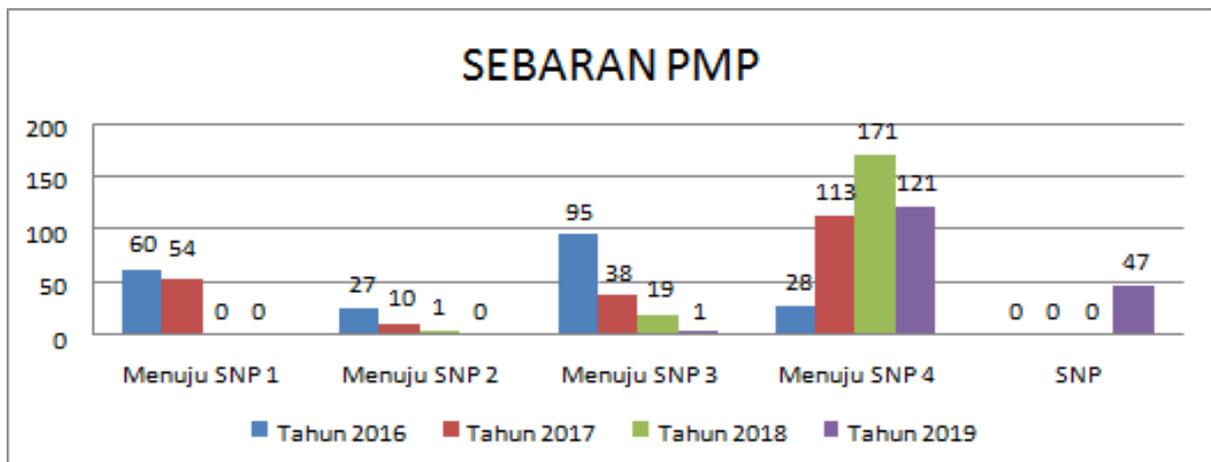


Gambar 1.14 Hasil Pemetaan Mutu Pendidikan Jenjang SMA

Jika dilihat secara lebih detail capaian untuk semua standar juga terlihat adanya peningkatan dari tahun 2016 s.d 2019.



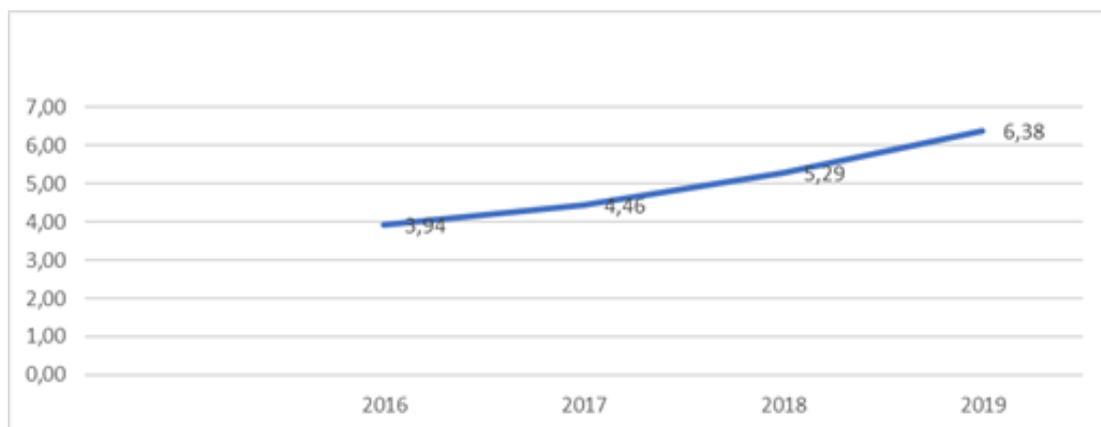
Gambar 1.15 Tren Peta Mutu Pendidikan Jenjang SMA



Gambar 1.16 Pemetaan Mutu Jenjang SMA Berdasarkan Kategori Capaian SNP

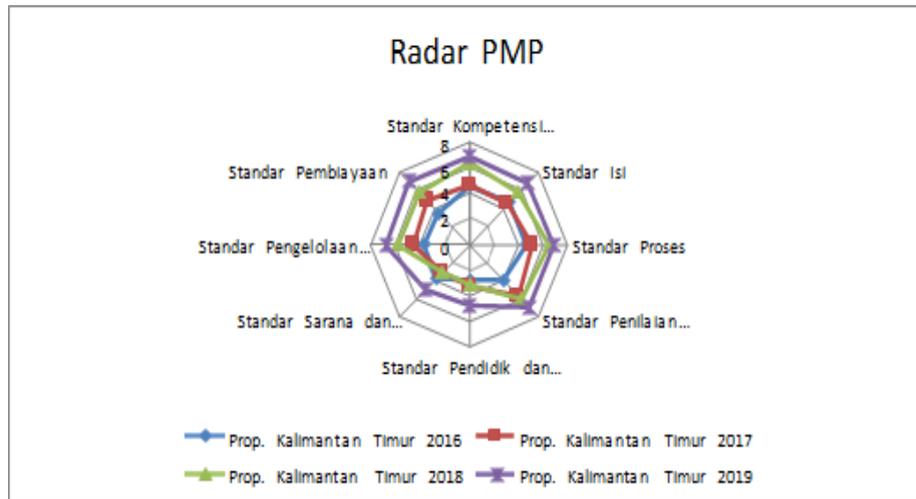
Mayoritas SMA sebanyak 121 sekolah dari 169 sekolah yang mengirim data PMP Tahun 2019 berada pada kategori menuju SNP 4 dan ada 47 sekolah berada pada kategori SNP. Terdapat peningkatan capaian SNP yang ditunjukkan dengan berkurangnya jumlah sekolah yang berada pada kategori menuju SNP1, SNP, SNP 3, dan SNP 4 disertai dengan peningkatan jumlah sekolah yang berada pada kategori SNP.

4) Pemetaan Mutu Pendidikan Jenjang SMK



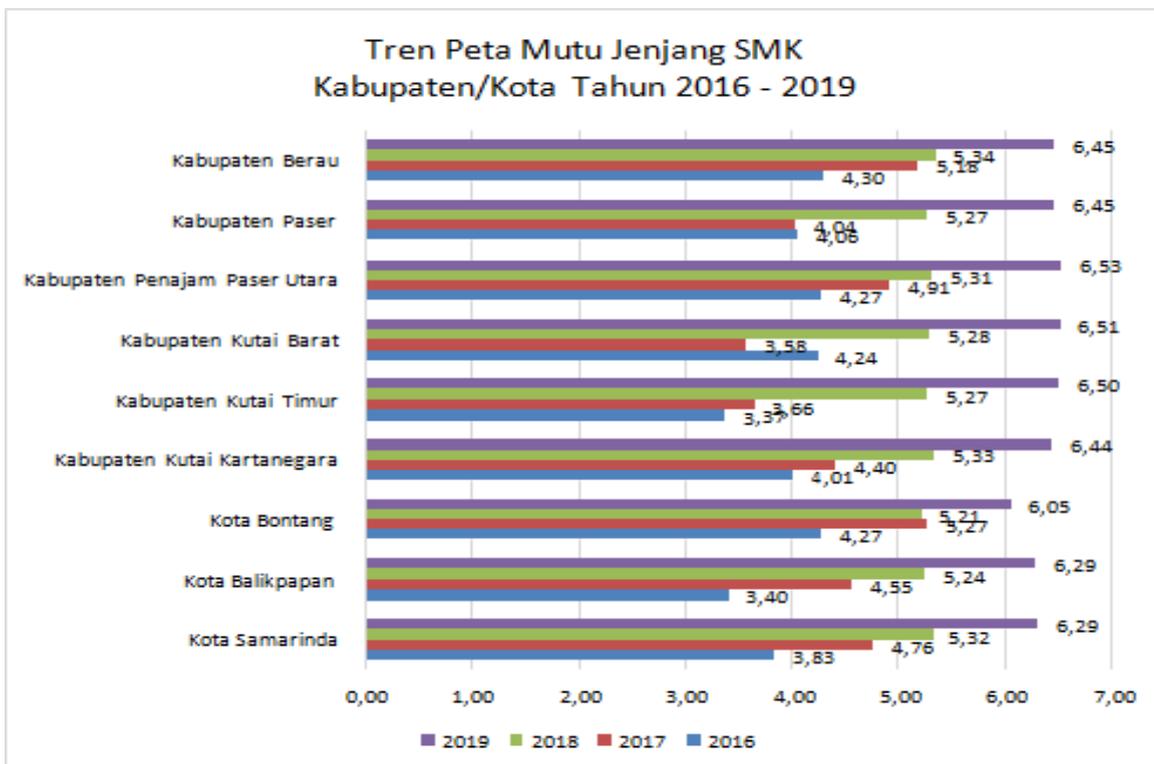
Gambar 1.17 Pemetaan Mutu Pendidikan Jenjang SMK

Perbandingan capaian SNP jenjang SMK menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2016 s.d 2019.

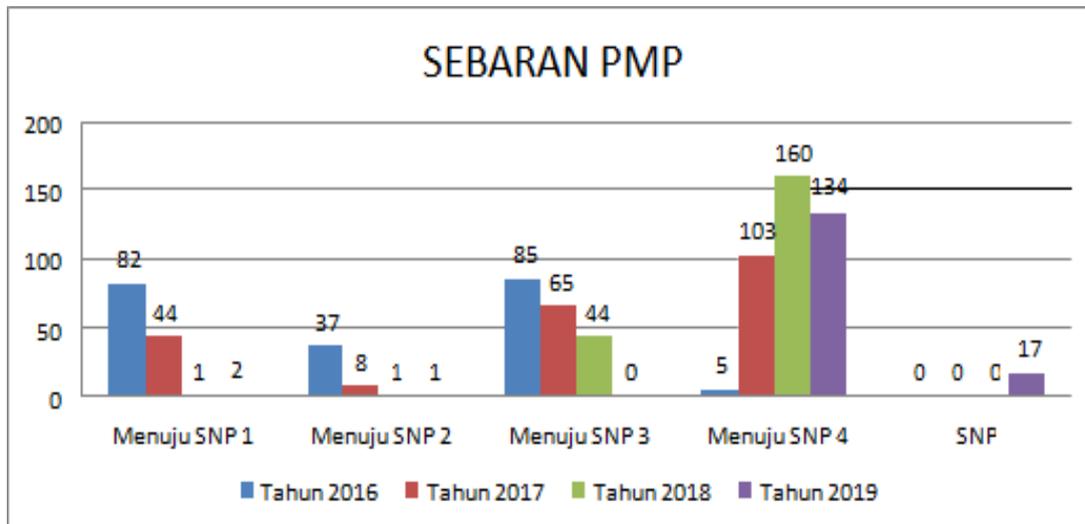


Gambar 1.18 Hasil Pemetaan Mutu Jenjang SMK

Jika dilihat secara lebih detail capaian untuk semua standar juga terlihat adanya peningkatan dari tahun 2016 s.d. 2019.



Gambar 1.19 Tren Peta Mutu Pendidikan Jenjang SMK

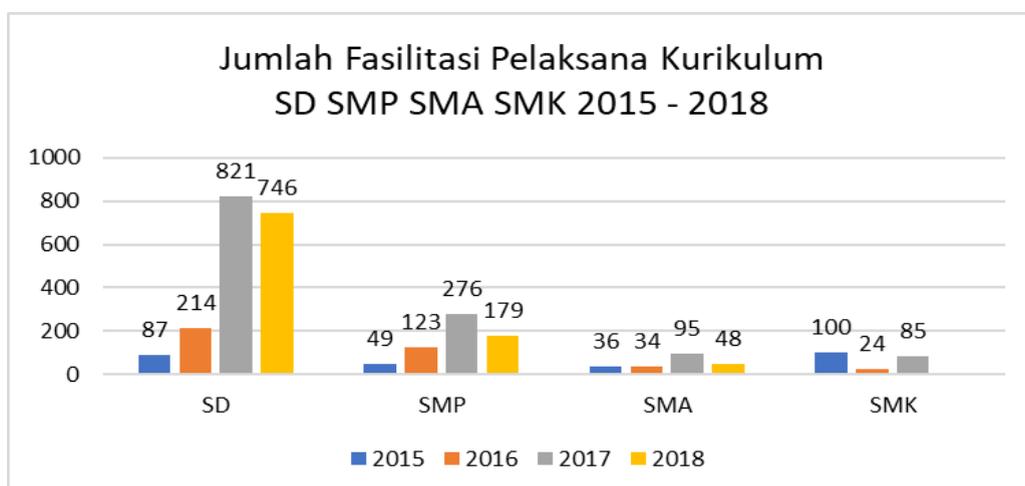


Gambar 1.20 Pemetaan Mutu Jenjang SMK Berdasarkan Kategori Capaian SNP

Mayoritas SMK sebanyak 134 sekolah dari 154 sekolah yang mengirim data PMP Tahun 2019 berada pada kategori menuju SNP 4 dan ada 17 sekolah berada pada kategori SNP. Terdapat peningkatan capaian SNP yang ditunjukkan dengan berkurangnya jumlah sekolah yang berada pada kategori menuju SNP1, SNP, SNP 3 dan SNP 4 disertai dengan peningkatan jumlah sekolah yang berada pada kategori SNP.

b. Supervisi Dan Fasilitasi Satuan Pendidikan

Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan dilaksanakan sejak tahun 2015-2019 melalui Program Pelatihan Sekolah Pelaksana Kurikulum, Pendampingan Sekolah Menuju SNP (Sekolah model/rujukan/binaan) dan Supervisi satuan pendidikan.



Gambar 1.21 Fasilitasi Sekolah Pelaksana Kurikulum 2015-2019

Pengembangan sekolah model telah dilakukan sejak tahun 2016. Kegiatan kegiatan yang dilakukan meliputi Bimtek, pendampingan dan supervisi, monev. Sekolah model/rujukan/binaan mendapatkan bimbingan dalam pengembangan sekolah menuju peningkatan mutu di 8 standar.

Tabel 1.3 Jumlah sekolah model sekolah imbas tahun 2016 s.d 2019

No	Kabupaten/Kota	2016		2017		2018		2019	
		SKL Model	SKL Imbas						
1	Samarinda	17	59	17	59	17	59	27	59
2	Balikpapan	20	60	20	60	20	60	20	60
3	Bontang	20	57	20	57	20	57	20	57
4	Kutai Kartanegara	21	59	21	59	21	59	22	59
5	Kutai Timur	20	53	20	53	20	53	20	53
6	Kutai Barat	20	59	20	59	20	59	20	59
7	Berau	19	65	19	65	19	65	19	65
8	Paser	20	62	20	62	20	62	20	62
9	Penajam Paser Utara	20	62	20	62	20	62	20	62
10	Mahakam Ulu	12	10	12	10	12	10	12	10
	Jumlah	189	546	189	546	189	546	200	546

Sekolah Model dengan rincian:

Tabel 1.4 Rincian sekolah model tahun 2016 s.d 2019

NO	KAB/ KOTA	SD	SMP	SMA	SMK	JUMLAH
1	Samarinda	15	15	14	15	59
2	Balikpapan	24	21	9	6	60
3	Bontang	25	18	8	6	57
4	Kutai Kartanegara	24	22	12	1	59
5	Kutai Timur	32	12	3	6	53
6	Kutai Barat	25	22	7	5	59
7	Berau	39	17	6	3	65
8	Paser	23	24	9	6	62
9	Penajam Paser Utara	32	19	5	6	62
10	Mahakam Ulu	6	3	1	0	10

Sekolah Imbas dengan rincian:

Tabel 1.4 Rincian sekolah imbas tahun 2016 s.d 2019

NO	KAB/ KOTA	SD	SMP	SMA	SMK	JUMLAH
1	Samarinda	15	15	14	15	59
2	Balikpapan	24	21	9	6	60
3	Bontang	25	18	8	6	57
4	Kutai Kartanegara	24	22	12	1	59
5	Kutai Timur	32	12	3	6	53
6	Kutai Barat	25	22	7	5	59
7	Berau	39	17	6	3	65
8	Paser	23	24	9	6	62
9	Penajam Paser Utara	32	19	5	6	62
10	Mahakam Ulu	6	3	1	0	10
Jumlah		245	173	74	54	546

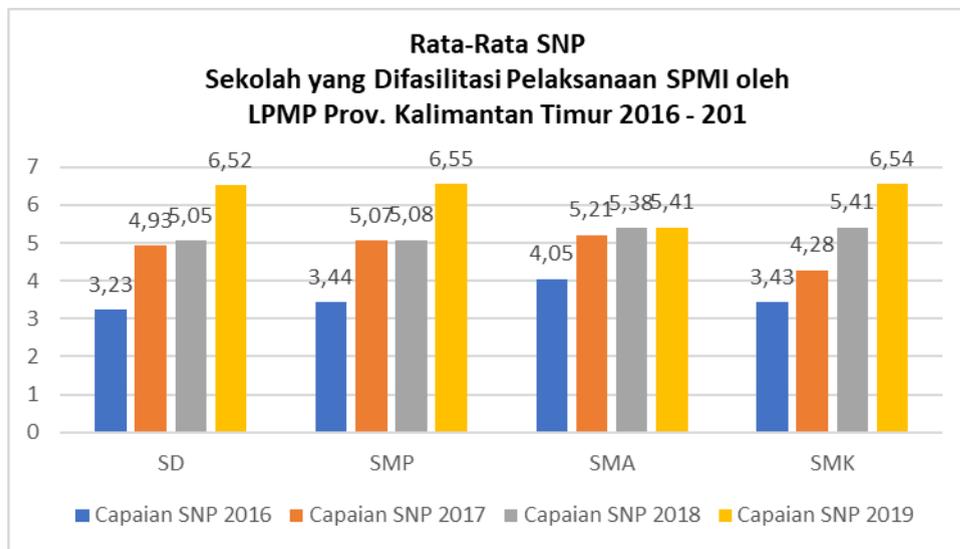
Selain sekolah model, juga telah dilakukan fasilitasi peningkatan mutu di sekolah rujukan:

Tabel 1.5 Rincian sekolah rujukan tahun 2019

No	Kabupaten/Kota	2019
1	Samarinda	8
2	Balikpapan	7
3	Bontang	4
4	Kutai Kartanegara	7
5	Kutai Timur	5
6	Kutai Barat	7
7	Berau	5
8	Paser	6
9	Penajam Paser Utara	4
10	Mahakam Ulu	2
	Jumlah	55



Gambar 1.22 Fasilitas sekolah pelaksana implementasi SPMI 2015-2019

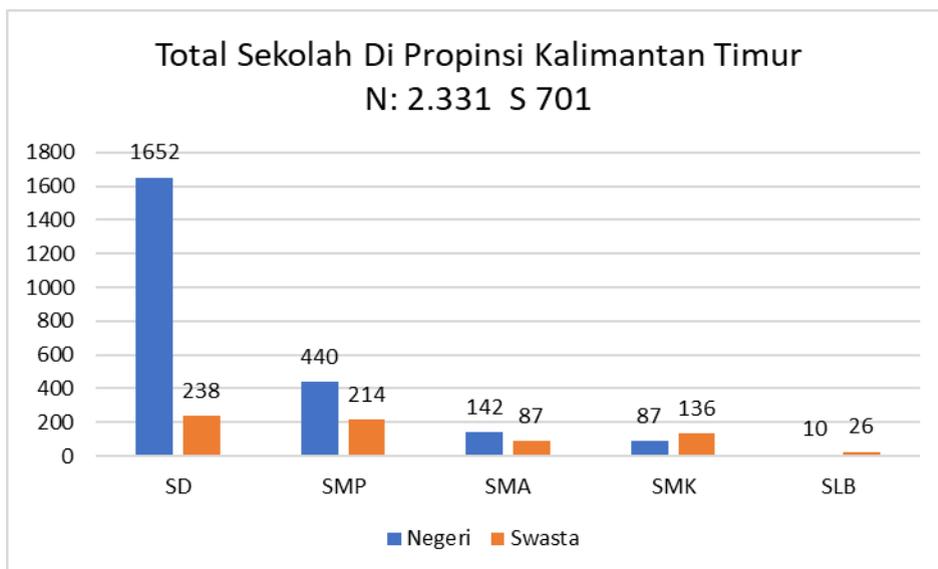


Gambar 1.23 Rata-rata Capaian SNP Sekolah yang Difasilitasi

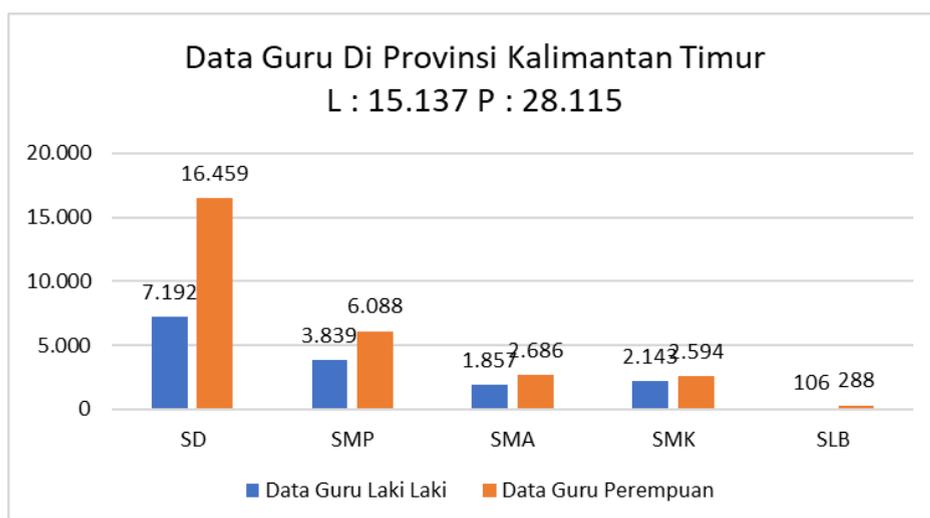
Terdapat peningkatan dalam capaian SNP pada sekolah sekolah yang difasilitasi oleh BPMP Kalimantan Timur

c. Data Pokok Kependidikan Di Provinsi Kalimantan Timur

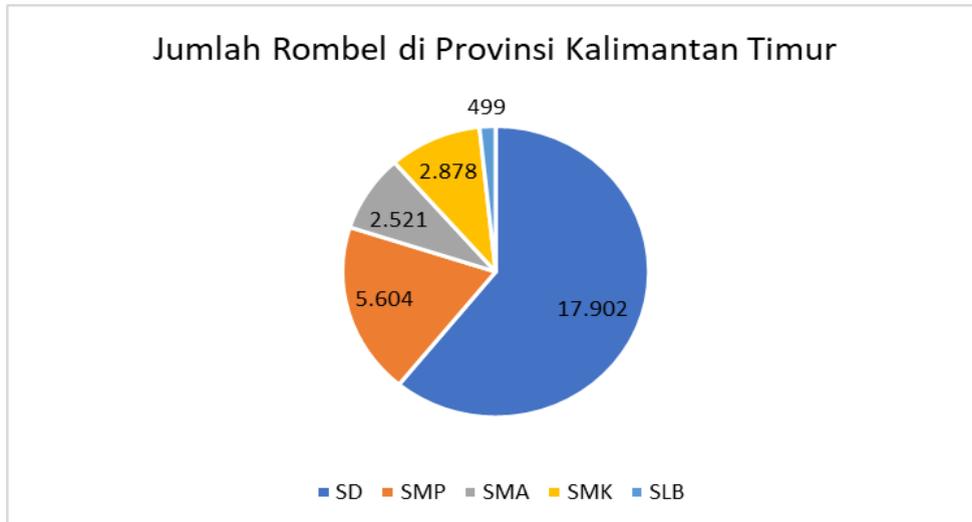
Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas 10 Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah tugas dari BPMP Kalimantan Timur. Adapun gambaran jumlah sekolah, guru, dan rombel adalah sebagai berikut:



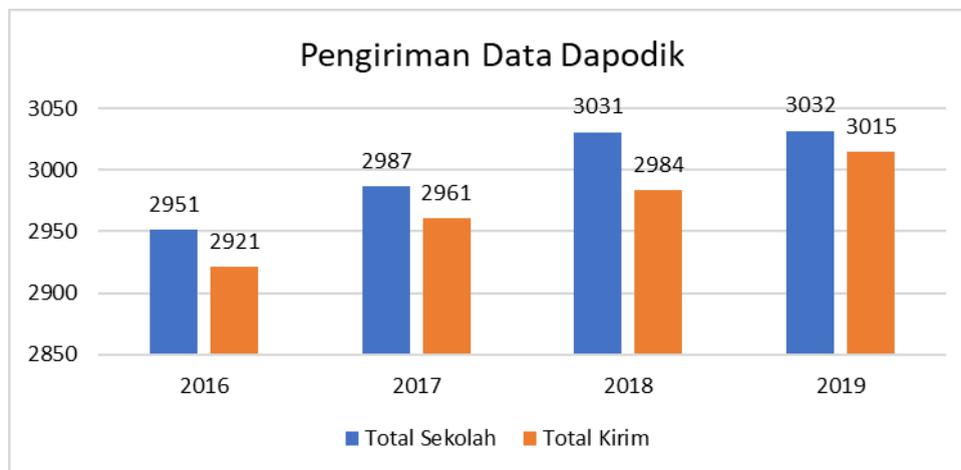
Gambar 1.24 Jumlah sekolah di Provinsi Kalimantan Timur
(Sumber:Dapodikdasmen Semester Genap Tahun 2019/2020)



Gambar 1.25 Jumlah Guru di Provinsi Kalimantan Timur



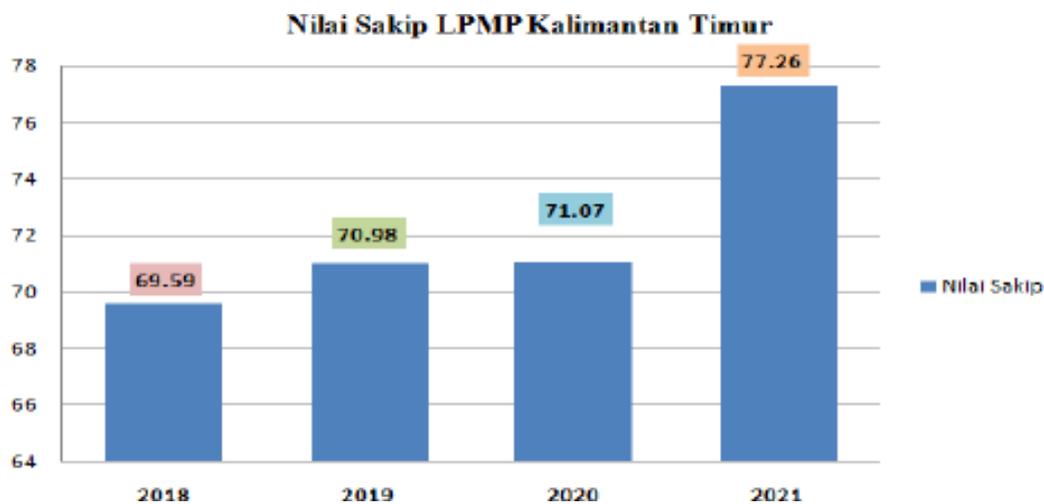
Gambar 1.26 Jumlah Sekolah di Provinsi Kalimantan Timur



Gambar 1.27 Progres pengiriman dapodik tahun 2016-2019

d. Tata Kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi enam komponen yaitu rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, reuiu, dan evaluasi kinerja. Nilai SAKIP yang diperoleh BPMP Kalimantan Timur mengalami peningkatan setiap tahunnya, dimulai dari tahun 2017 dengan predikat B, meningkat menjadi BB pada tahun 2018 dan 2019, 2020, 2021 dengan nilai capaian yang terus mengalami peningkatan.



Gambar 1.28 Tren Peningkatan Nilai SAKIP

2. Isu Strategis yang Berkembang

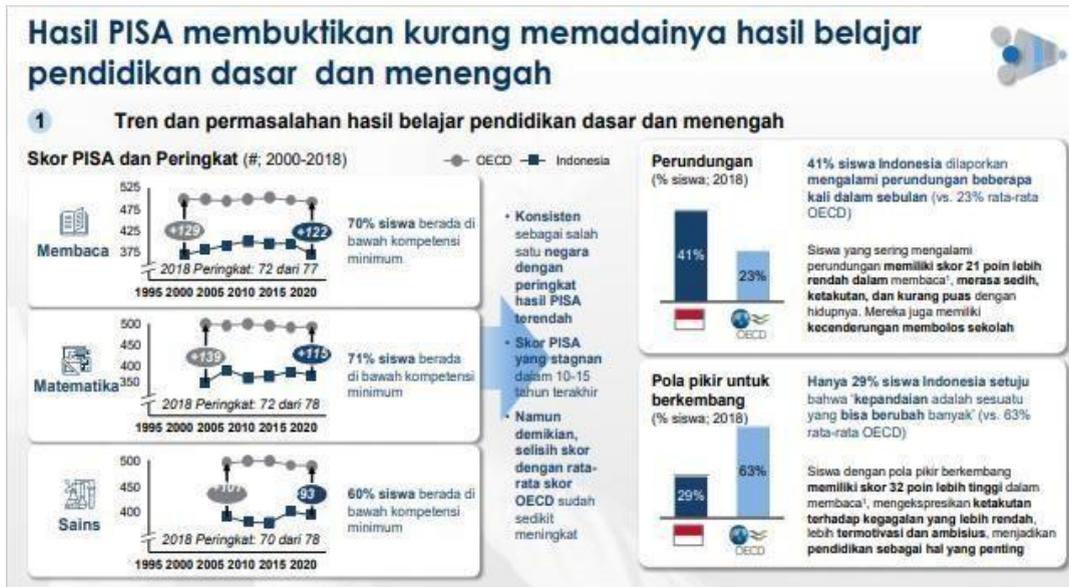
a. Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Pembiasaan dan Keteladanan

Penanaman dan pengembangan karakter di sekolah belum menunjukkan hasil yang mengembirakan. Perilaku negatif siswa di sekolah dan di luar sekolah sangat memprihatinkan. Tawuran antar siswa, kurangnya kesantunan, kejujuran, disiplin adalah beberapa contoh yang tengah melanda para siswa. Pendidikan karakter di sekolah dilaksanakan lebih banyak melalui proses pembelajaran dan kurang menekankan pada proses pembelajaran dan kurang memprioritaskan proses, pembiasaan, keteladanan dan penciptaan lingkungan sekolah yang kondusif bagi pertumbuhan dan pembinaan ahlak mulia yang didukung dengan keterlibatan orang tua dan masyarakat secara proporsional. Perlu dilakukan upaya secara intensif, ekstensif, holistik dan terprogram. Penguatan pendidikan karakter akan menjadi tantangan berat bagi pendidikan dengan terwujudnya Profil pelajar Pancasila yang Berima bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Berakhlak mulia, Mandiri, Bernalar Kritis, Kreatif, Bergotong Royong dan Ber Kebhinekaan Global.

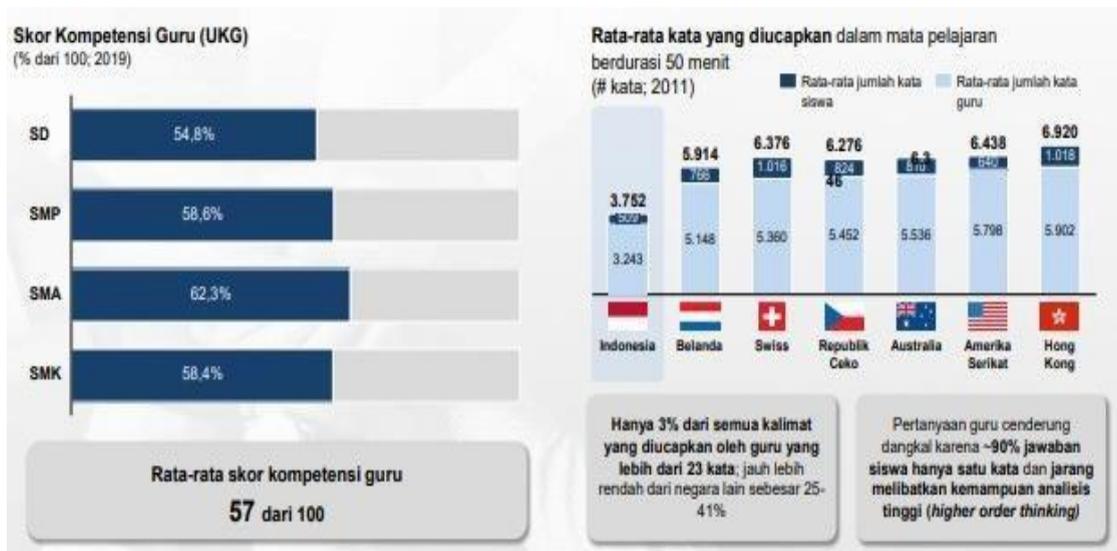
b. Peningkatan Kualitas Pengajaran Dan Pembelajaran (Softskill, 6 Literasi Dasar, Kompetensi Abad Ke-21)

Peradaban manusia banyak dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu penguasaan terhadap iptek adalah tidak dapat ditawar-tawar lagi. Namun demikian penguasaan iptek semata tidaklah cukup, karena kemajuan bangsa selain ditentukan pada penguasaan terhadap hardskill juga pada penguasaan softskill, yaitu kemampuan pemanfaatan iptek bagi

kemaslahatan manusia. Kemampuan berkomunikasi, bernegosiasi, kreatifitas dan inovasi adalah kemampuan yang harus ada di samping kemampuan dalam iptek., Sementara ini, Pendidikan lebih menekankan pada penguasaan hard skills dan kurang mengembangkan kemampuan soft skills siswa. Untuk itu pendidikan perlu meningkatkan 6 literasi dasar: Literasi Baca Tulis; Numerasi; Literasi Sains; Literasi Finansial; Literasi Digital; dan Literasi Budaya dan Kewargaan.



Gambar 1.29 Tren permasalahan hasil belajar



1.30 Kesenjangan dalam Keefektifan Mengajar dan Cara Mengajar

c. Kebijakan Merdeka Belajar

Kebijakan Merdeka Belajar, ada empat pokok kebijakan belajar jenjang pendidikandasardan

menengah, yaitu:

- 1) Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dengan memperbesar kewenangan gurudan sekolah;
- 2) Ujian Nasional yang dihapuskan dan pelaksanaan Asesmen Nasional sebagaipengganti;
- 3) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang lebih sederhana; dan
- 4) Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi yang lebih fleksibel.

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Penyusunan rencana strategis BPMP Kalimantan Timur perlu memperhatikan analisis lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman) dengan cara mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki BPMP Provinsi Kalimantan Timur saat ini.

1. Potensi yang Dimiliki

Mengacu kepada Rencana Strategis Kemdikbud tahun 2020 - 2024, beberapa potensi yang bisa menjadi perhatian, adalah:

- a) Memiliki jaringan kerja dan kemitraan dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan penjaminan mutu pendidikan.
- b) Memiliki pengalaman dalam melaksanakan berbagai kegiatan seperti fasilitasi, pemetaan dan pengembangan sistem informasi serta pelayanan dalam berbagai kegiatan.
- c) Sumber daya manusia yang memadai; Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur memiliki ketersediaan sumberdaya manusia sejumlah 69 Orang PNS dan 56 orang tenaga kontrak. Dari 69 orang PNS memiliki kualifikasi pendidikan S-3 sejumlah 2 orang, S-2 sejumlah 11 orang, S-1 sejumlah 38 orang D3 sejumlah 10 dan SMA/ sederajat sejumlah 8 orang. Kompetensi yang beragam telah dimiliki oleh seluruh sumberdaya Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan peta jabatan dalam Permendikbud Nomor 12 Tahun 2019 yang ada untuk menunjang pelaksanaan tugas penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur.
- d) Sarana dan Prasarana yang menunjang; dalam rentang waktu 2015–2019 LPMP Provinsi Kalimantan Timur terus melakukan beragam inovasi dalam melengkapi sarana prasarana dan fasilitas fasilitas yang menunjang peningkatan kualitas pelayanan BPMP Prov. Kalimantan Timur. Fasilitas seperti Kantor utama, ULT, Perpustakaan, Asrama, Ruang Kelas, fasilitas olah raga, taman dan lingkungan telah mengalami peningkatan yang sangat drastis dari masa sebelumnya.

Semua upaya peningkatan kualitas dan kapasitas di maksudkan agar semakin meningkatkan kinerja seluruh pegawai BPMP Kalimantan Timur dan BPMP Kalimantan Timur sebagai sebuah UPT pelaksana Kemendikbud dalam melaksanakan program peningkatan mutu.

2. Permasalahan yang Dihadapi

Permasalahan-permasalahan yang masih dihadapi di bidang pendidikan dasar dan menengah yang perlu dipecahkan melalui penetapan serangkaian kebijakan- kebijakan/strategi sebagai landasan bagi penyusunan program-program Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Jumlah Sekolah Yang Mencapai Kategori “SNP”

Tujuan penjaminan mutu adalah untuk memastikan terselenggaranya pendidikan yang berkualitas. Upaya-upaya ke arah pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah berpedoman pada standar sesuai peraturan yang berlaku. Pedoman ini tertuang pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). SNP merupakan standar minimal yang ditetapkan pemerintah dalam bidang pendidikan yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan dan semua pemangku kepentingan dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan. Standar itu meliputi:

- a. Standar Kompetensi Lulusan;
- b. Standar Isi;
- c. Standar Proses;
- d. Standar Penilaian;
- e. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- f. Standar Pengelolaan;
- g. Standar Sarana dan Prasarana; dan
- h. Standar Pembiayaan.

Berdasarkan capaian rapor mutu tahun 2019 terlihat masih rendahnya sekolah sekolah dengan capaian “SNP”. Hal ini menjadi tantangan untuk dapat terus di tingkatkan melalui pelaksanaan program di 2020-2024.

Tabel 1.6 Sekolah yang Telah Mencapai Kategori “SNP” Tahun 2019

Jenjang	Jumlah	SNP	%
SD	1652	269	14,23
SMP	440	135	20,64
SMA	142	47	20,52
SMK	87	17	7,62
Total	2996	468	15,76

b. Tata Kelola dan Pelayanan Organisasi Perlu Terus Ditingkatkan Kualitasnya

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Oleh karena itu pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem tersebut yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik.

BPMP Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2019 memperoleh nilai SAKIP 71.07 dengan capaian BB. Nilai capaian yang di peroleh selalu meningkat untuk setiap tahunnya yang menunjukkan bahwa BPMP terus menerus melakukan perbaikan dan peningkatan dalam tata kelola dan pelayanan organisasi. Upaya peningkatan masih terus di upayakan dengan mengacu pada aspek aspek dalam implementasi SAKIP yang meliputi:

- a. Perencanaan
- b. Pengukuran kinerja
- c. Pelaporan kinerja dan review laporan kinerja
- d. Evaluasi kinerja

c. Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman

Adanya potensi dan permasalahan yang dihadapi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikandi Provinsi Kalimantan Timur menjadi dasar analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sebagai berikut:

Tabel 1.7 Matriks Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman

Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman
Adanya peta mutu Pendidikan yang dihasilkan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur sebagai dasar pemberian layanan fasilitasi dan supervisi dalam upaya peningkatan sekolah yang mencapai “SNP”	Ketergantungan pada system pengumpulan data mutu yang dikembangkan oleh pusat dan belum maksimalnya alokasi anggaran bagi pengembangan sistem pengumpulan data kepada para operator dan pengawas yang akan melakukan supervisi ke sekolah dalam rangka mutu pendidikan	Peningkatan kapasitas hubungan kemitraan dengan para stakeholder pendidikan Terjalin secara intensif dalam upaya mengoptimalkan pengembangan system pengumpulan data mutu pendidikan	Hasil pemetaan mutu pendidikan tidak optimal dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan dalam memberikan intervensi yang diperlukan bagi perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan. Validitas data hasil pemetaan mutu pendidikan
Tersedianya personal yang memiliki kualifikasi cukup memadai yang terdiri dari jabatan fungsional umum dan fungsional tertentu (widyaiswara dan pengembang	Masih kurangnya kemampuan teknologi informasi dalam pengembangan aplikasi online dalam mengakses hasil peta mutu sekolah yang ada dipropinsi	Pentingnya peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam pemenuhan SNP	Tidak optimalnya Fasilitasi dalam pemenuhan SDM TIK, perbaikan dan peningkatan kualitas proses pembelajaran dan pengelolaan sumber daya

teknologi pembelajaran)	Kalimantan Timur dan aplikasi lainnya yang dapat mempercepat proses pekerjaan		pendidikan
Tata kelola dan pelayanan organisasi yang baik perlu di tingkatkan kualitasnya sehingga akan berdampak bagi peningkatan kinerja dan pelayanan yang prima	Kurangnya terintegrasinya layanan yang dilakukan berbagai unsure	Peningkatan pelayanan penjaminan mutu pendidikan kepada dinas pendidikan, sekolah dan stakeholders lainnya dengan membuat inovasi pelayanan yang baru	Kewenangan dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan yang terbatas

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN
BPMP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Dalam melaksanakan Perencanaan Strategis Lembaga yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran strategis, serta Indikator target kinerja yang merupakan satu kesatuan yang utuh menghasilkan rencanastrategis lembaga.

A. TUJUAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA

Sebagai upaya untuk mendukung keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta untuk memastikan kesesuaian antara Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Rencana Strategis Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Timur, maka disusunlah Tujuan Strategis Dan Indikator Kinerja BPMP Kalimantan Timur.

Tabel 2.1 Tujuan Strategis dan Indikator Kinerja Tujuan Strategis

KODE	TUJUAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN STRATEGIS
TS1	Meningkatkannya kualitas dan kemanfaatan hasil assesmen pendidikan di propinsi Kalimantan Timur	Persentase Satuan Pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SLB di Provinsi Kalimantan Timur yang meningkat mutunya
TS2	Memperkuat sistem tata Kelola yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	Predikat Akuntabilitas Kinerja Lembaga A

Berdasarkan Tabel 2.1, Indikator Kinerja Tujuan Strategis disusun untuk dapat mengukur ketercapaian dari Tujuan Strategis. Indikator tersebut diharapkan dapat tercapai dalam periode Renstra Tahun 2020 s.d. 2024.

B. TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam upaya merealisasikan tujuan strategis BPMP Kalimantan Timur pada tahun 2020–2024 LPMP Kalimantan Timur telah menetapkan sasaran strategis. Sasaran strategis BPMP Kalimantan Timur diturunkan atau *dibreakdown* dari tujuan strategis tujuan strategis BPMP Kalimantan Timur, sebagaimana disajikan Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Sasaran Strategis BPMP Kalimantan Timur 2020–2024

TUJUAN STRATEGIS (TS1)	TUJUAN STRATEGIS (TS2)
Meningkatnya kualitas dan kemanfaatan hasil assesmen pendidikan di propinsi Kalimantan Timur	Memperkuat sistem tata kelola yang partisipatif, transparan, dan akuntabel



SASARAN STRATEGIS (SS1)	SASARAN STRATEGIS (SS2)
Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen	Menguatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan yang baik

Sasaran Strategis BPMP Provinsi Kalimantan Timur disusun untuk dapat merealisasikan terwujudnya Tujuan Strategis BPMP Provinsi Kalimantan Timur. Sasaran Strategis BPMP Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya diimplementasikan dalam berbagai macam program dan kegiatan.

C. INDIKATOR KINERJA SASARAN

Dalam upaya mencapai Sasaran Strategis Pertama (SS.1) Terwujudnya penjaminan mutu pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, ditetapkan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut.

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Strategis pertama

KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
IKK 1.1	Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya
IKK 1.2	Persentase Propinsi dan kabupaten/kota yang meningkat rapot pendidikannya (dikdas dan dikmen)

Dalam upaya mencapai Sasaran Strategis Kedua (SS.2) Terwujudnya Tata Kelola BPMP Kalimantan Timur yang baik, ditetapkan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Strategis Kedua

KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
IKK 2.1	Predikat Sakip BPMP Kalimantan Timur minimal “A”
IKK 2.2	Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA- K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur

Perumusan IKK dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi sebagaimana disajikan tabel-tabel tersebut dirumuskan dari sasaran strategis BPMP Kalimantan Timur dengan tetap memperhatikan kesesuaian dari Tujuan, sasaran dan Indikator kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah yang dinyatakan Sasaran Strategis (SS), Sasaran Program (SP) dan Sasaran Kegiatan (SK). Keterkaitan/keselarasan antara indikator kinerja sasaran strategis kementerian, Indikator kinerja program ditjen paud dikdasmen dan Indikator Kinerja Kegiatan BPMP Kalimantan Timur disajikan pada Gambar 2.1.

Nomor SS/IKSS/IKK	Sasaran Strategis Kementerian
SS 2	Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) dan relevansi di seluruh jenjang
IKSS 2.1	Nilai kualitas lingkungan belajar PAUD
IKSS 2.2	Proporsi peserta didik yang memiliki nilai di atas batas minimum dalam assesmen kompetensi minimum <ul style="list-style-type: none"> a. Literasi b. Numerasi

SS 5	Meningkatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi yang partisipatif, transparan dan akuntabel
SP	Terwujudnya tata kelola kemendikbudistek yang berkualitas
IKSS 5.3	Predikat SAKIP Kemendikbudristek
IKSS 5.4	Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek
IKP 5.4.2	Persentase satker di lingkungan Kemendikbudristek mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM
IKP 5.4.4	Jumlah satker di Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM
SK	Menguatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen
IKK 5.3.6.1	Persentase Satker di Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen yang memiliki predikat SAKIP minimal A
IKK 5.4.4.1	Jumlah satker di Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK /WBBM
SK/SP/IKP/IKK	Sasaran Program PAUD
SK	Meningkatnya capaian perkembangan PAUD yang berkualitas
SP	Meningkatnya nilai assesmen kompetensi (literasi dan numerasi) satuan pendidikan
IKP 2.2.1	Jumlah satuan pendidikan yang menjadi sekolah penggerak
SK	Meningkatnya pembelajaran PAUD yang berkualitas
IKK 2.2.1.1	Jumlah PAUD Penggerak
SK	Meningkatnya pembelajaran pendidikan masyarakat dan pendidikan khusus yang berkualitas
IKK 2.2.1.5	Jumlah SLB Penggerak
SP	Meningkatnya kualitas dan kemanfaatan hasil assesment untuk praktik pembelajaran
IKP 2.2.7	Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan profil

	dan rapor pendidikan untuk mendukung perbaikan pembelajaran
SK	Meningkatnya pembelajaran PAUD yang berkualitas
IKK 2.2.7.1	Persentase satuan PAUD yang mendapatkan pembinaan peningkatan mutu pembelajaran
IKK 2.2.7.2	Persentase satuan PAUD yang menggunakan perangkat pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran berkualitas
SK	Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen
IKK 2.2.7.11	Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya.
IKK 2.2.7.12	Persentase Provinsi dan kabupaten/kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)

Gambar 2.1. Keselarasan IKSS, IKP dan IKK

BAB III
ARAH KEBIJAKAN STRATEGI
KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah kebijakan pembangunan jangka panjang RPJM IV 2020–2024 yakni mewujudkan manusia Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan yang kompetitif. Hal tersebut sesuai dengan pencapaian Visi periode kedua Presiden Joko Widodo untuk tahun 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong”. Untuk mendukung ketercapaian visi tersebut maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan tugas dan fungsi akan menjalankan salah satu misi nawacita kedua yaitu pembangunan Sumber Daya Manusia dengan dua agenda:

- (1) meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing,
- (2) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah sesuai tugas dan fungsinya mendukung ketercapaian sasaran strategis meningkatnya Penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur. Arah kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur dalam periode 2020-2024 untuk mencapai sasaran strategis tersebut mengacu pada arah kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Peran BPMP Provinsi Kalimantan Timur dalam Mendukung Agenda Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Agenda Pembangunan	Arah kebijakan	Strategi
Meningkatkan SDM Yang Berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan pemerataan Layanan pendidikan berkualitas	Penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk Meningkatkan pemerataan kualitas layanan antar satuan pendidikan dan

		antar wilayah di Provinsi Kalimantan Timur
Revolusi mental dan Pembangunan Kebudayaan	Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan Berkarakter	Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan Responsive

Peran Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur pada tabel di atas menjadi pertimbangan dalam menentukan arahan kebijakan dan strategi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dibawah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah. Prinsip mendasar yang menjadi pedoman arah kebijakan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur adalah mendukung arah kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya serta bersinergi dengan instansi lain, baik dengan pemerintah daerah maupun masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur.

B. STRATEGI PENINGKATAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Adapun strategi yang dilakukan oleh Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan tugas dan fungsinya, dalam rangka peningkatan Penjaminan Mutu Pendidikan adalah:

1. Melaksanakan pemetaan mutu satuan pendidikan (SD, SMP, SMA, dan SLB) dengan lebih berkualitas
2. Melaksanakan supervisi dan fasilitasi kepada satuan pendidikan (SD, SMP, SMA dan SLB) secara lebih efektif dan efisien terutama kepada satuan pendidikan dengan nilai SNP nya rendah
3. Melakukan pengembangan model penjaminan mutu yang bermutu dan bermanfaat
4. Menjalin kerjasama dan kemitraan yang lebih kuat serta meningkatkan sistem koordinasi dengan pemangku kepentingan di propinsi Kalimantan Timur dalam rangka peningkatan mutu pendidikan

dan kinerja satuan pendidikan.

5. Melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan menengah yang inovatif dan aplikatif
6. Melaksanakan urusan administrasi BPMP secara efektif, efisien dan akuntabel

C. KERANGKA REGULASI

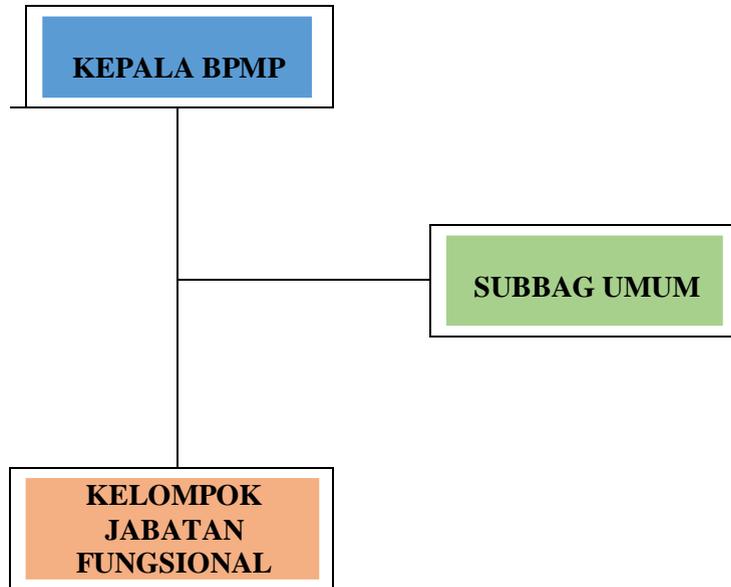
1. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berpedoman pada kerangka regulasi. Kerangka Regulasi yang relevan dan menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:
2. Undang Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang Undang No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No 11 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (SPMP)

D. KERANGKA KELEMBAGAAN

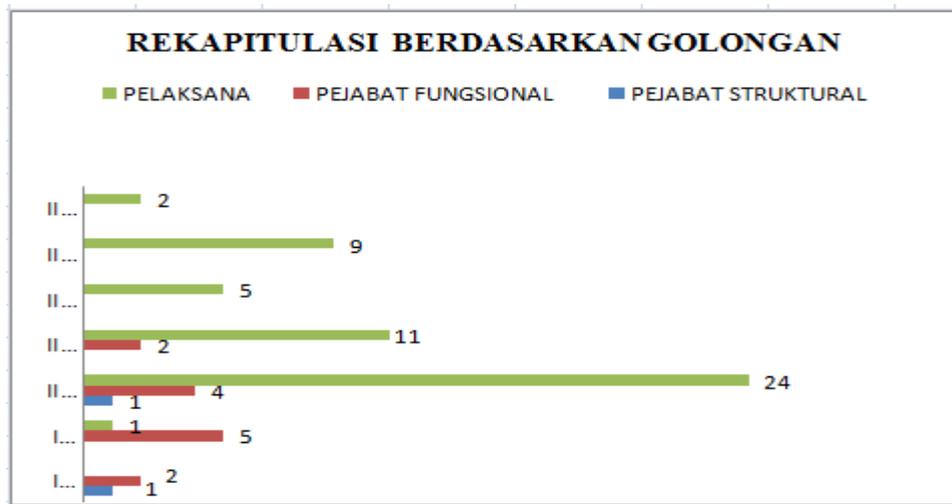
1. Struktur Kelembagaan

Berdasarkan Permendikbud, Riset dan Teknologi Nomor 11 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tatakerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:

Gambar 3.1 Bagan Struktur BPMP Kalimantan Timur



2. Sumber Daya Manusia



Gambar 3.2 SDM BPMP Kalimantan Timur Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan



Gambar 3.3 SDM BPMP Kalimantan Timur Berdasarkan Golongan

3. Tugas dan Fungsi LPMP

BPMP mempunyai tugas melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat di Provinsi. Adapun fungsi dari BPMP adalah:

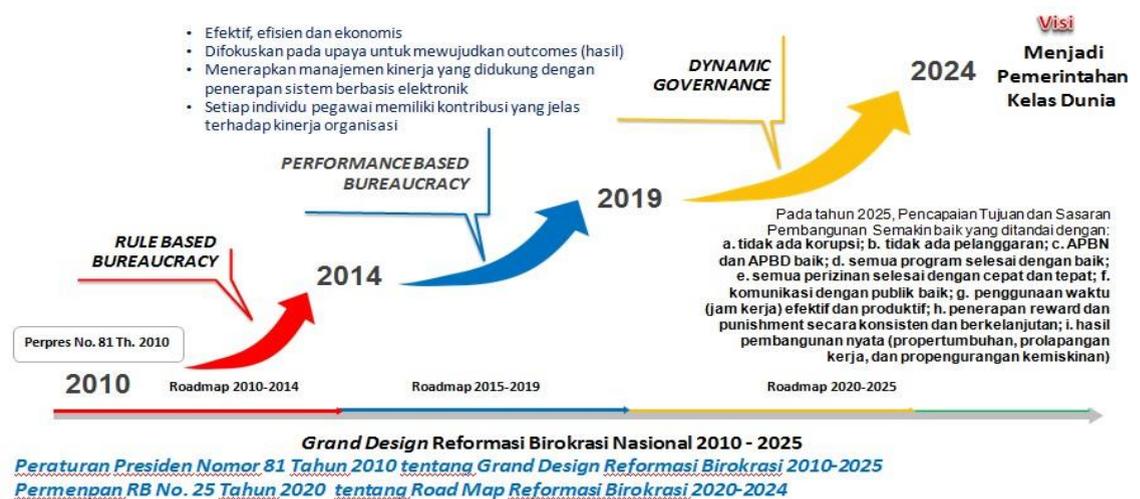
1. Pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan masyarakat;
2. Pengembangan model penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
3. Pelaksanaan supervisi penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan;
4. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan;
5. Pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan masyarakat.
6. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat; dan
7. Pelaksanaan urusan administrasi.

E. REFORMASI BIROKRASI

Program Reformasi Birokrasi sudah dimulai sejak tahun 2010 dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) 2010-2025.

Bedasarkan Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) 2010- 2025 inilah kemudian dibuat Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 fase ke-1 dan Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 fase ke-2. Pada tahun 2020, Reformasi Birokrasi akan masuk fase ke-3, yaitu sejak 2020-2024. Fase ke-1 di bawah kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono serta fase ke-2 dan ke-3 di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Tujuan Reformasi Birokrasi sesuai dengan Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) 2010-2025, yaitu untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, menjadi pelayan masyarakat, dan abdi negara. Birokrasi seperti itu diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata pada capaian kinerja pemerintahan dan pembangunan nasional serta daerah. Tujuan Reformasi Birokrasi di atas adalah dalam rangka mengejar visi Reformasi Birokrasi yaitu “terwujudnya pemerintahan kelas dunia”. Berikut grand design Reformasi Birokrasi Nasional 2010-2025:

TRANSFORMASI BIROKRASI SAMPAI 2025



Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur pada periode 2020- 2024 juga memiliki komitmen untuk tetap melanjutkan berbagai upaya pelaksanaan reformasi birokrasi yang meliputi enam area perubahan agar layanan yang berkualitas dan berintegritas dapat tumbuh dan berkembang menjadi budaya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh warga di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur.

1. Manajemen Perubahan

- a) Penetapan SK tim reformasi birokrasi
- b) Sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai Kementerian secara terus menerus agar menjadi budaya di lingkungan BPMP Kalimantan Timur

2. Penataan Tata Laksana

- a) Melakukan pengembangan pelayanan publik

- b) Memperkuat sistem pengarsipan
3. Penguatan Sistem Manajemen SDM
 - a) Melakukan penataan dan penguatan SDM PNS di lingkungan BPMP Kalimantan Timur
 - b) Penerapan penilaian kinerja sesuai SKP dengan sistem online sesuai kinerja masing masing individu
 - c) Sinkronisasi dan up dating data pegawai yang terjadwalkan secara berkala
 4. Penguatan Akuntabilitas
 - a) Penerapan sistem/aplikasi dalam perencanaan, penganggaran dan pelaporan
 - b) Penyampaian laporan secara periodik dan online serta terintegrasi
 - c) Peningkatan kapasitas SDM dalam implelementasi SAKIP
 - d) Internalalisasi SAKIP dan meningkatkan sinergitas dalam mendorong budaya kerja
 5. Penguatan Pengawasan
 - a) Optimalisasi peran SPI dan SPIP
 - b) Optimalisasi penanganan pengaduan masyarakat
 - c) Mengupayakan adanya reward dan punishment
 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 - a) Menyusun standar pelayanan dan SOP pelayanan publik
 - b) Melakukan evaluasi kinerja pelayanan publik.
 - c) Mengadakan sistem pengelolaan pengaduan
 - d) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara berkala.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, akan senantiasa berusaha untuk melaksanakan setiap program sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam reformasi birokrasi, yakni reformasi yang berkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), anggaran berbasis kinerja, organisasi (Kelembagaan) berbasis kinerja, dan sistem sumber daya aparatur yang berorientasi pada kinerja yang menjadi prioritas utama. Jika semua program tersebut terlaksana dengan baik dan benar, maka reformasi pelayanan publik yang berkinerja baik pun akan lebih mudah dilakukan. Pada tahun 2019 dan tahun 2020, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan penghargaan nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKAKL 2019 baik dalam Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) maupun pada Evaluasi Kinerja Akhir (EKA). Adapun jenis penghargaan yang telah diraih dalam hal pelaksanaan kinerja anggaran sebagai berikut:



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. TARGET KINERJA

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden RI yang diamanahkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur menetapkan dua sasaran kegiatan yang dikenal dengan sasaran strategis. Sasaran strategis ini merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata yang mencerminkan keberhasilan (*outcome*) darisatu atau beberapa program. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dimaksud, setiap sasaran kegiatan (sasaran strategis) diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Kegiatan. Berdasarkan matriks kinerja dan pendanaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2022 – 2024, maka diperoleh turunan matriks kinerja BPMP Kalimantan Timur sebagai berikut:

Tabel. 4.1. Sasaran Kegiatan (Sasaran Strategis), Indikator Kinerja, dan Target Kinerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020–2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
2.	Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya			0.98	1.96	3.92
		Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	-	-	25%	30%	35%

2.	Terwujudnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan yang baik	1. Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur	A	A	A	A	A
		2. Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKAKL	83	83	83	84	84

Tabel 4.2 Sasaran Strategis (Sasaran Kegiatan) dan 3 Indikator Kegiatan (Indikator Kinerja) Serta 3 Ouput/Komponen yang Sesuai, Untuk Tahun 2022-2024 Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Komponen	Ouput
1.	Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	1. Persentase provinsi dan kab/kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	063.Pendampingan Fasilitasi Berdasarkan SNP 084.Verifikasi dan Validasi Data Mutu Pendidikan	6397.QDB

		Predikat SAKIP Badan Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur	055.Pelayanan Umum, Rumah Tangga dan Perlengkapan	2005.EBA
2	Meningkatnya tata kelola BPMP Kalimantan Timur yang baik	Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-KL Badan Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur	001.Gaji dan Tunjangan 002.Operasional dan Pemeliharaan Kantor 997.Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	2005.EBA 2005.EBB

B. KERANGKA PENDANAAN

Upaya untuk mencapai tujuan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya, dukungan sarana dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup. Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Kerangka Pendanaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2022 - 2024

Kode	Sasaran Program (outcome)/sasaran kegiatan/indikator	Alokasi (dalam juta rupiah)		
		2022	2023	2024
SS2	Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) dan relevansi di seluruh jenjang			
KSS2.1	Nilai kualitas lingkungan belajar PAUD			

IKSS2.2	Proporsi peserta didik yang memiliki nilai di atas batas a.literasi b.Numerasi			
SS 5	Meningkatnya tatakelola pendidikan, kebudayaan,riset,dan teknologi yang partisipatif,transparan dan akuntabel			
SP	Terwujudnya tata kelola kemendikbudristek yang berkualitas			
IKSS5.3	Predikat SAKIP Kemendikbudristek			
IKSS5.4	Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek			
IKP 5.4.2	Persentase satker di lingkungan Kemendikbudristek mendapatkan predikat ZI WBK/WBBM	23.472.32	24.176.48	24.901.79
IKP 5.4.4	Jumlah satker di Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	1.016.22.998	1.321.098.97	1.717.428.66
SK	Menguatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen PAUD,Dikdas dan Dikmen			
IKK 5.3.6.1	Persentase satker di Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen yang memiliki predikat SAKIP minimal A	110.287.35	143.373.56	186.385.62
IKK 5.4.4.1	Jumlah satker di Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar	1.016.229.98	1.321.098.97	1.717.428.66

	dan Pendidikan Menengah yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM			
SK	Meningkatnya capaian perkembangan PAUD yang berkualitas			
SP	Meningkatnya nilai assesmen kompetensi (literasi dan numerasi) satuan pendidikan			
IKP 2.2.1	Jumlah satuan pendidikan yang menjadi sekolah penggerak	100.464.13	130.603.37	169.784.38
SK	Meningkatnya pembelajaran PAUD yang berkualitas			
IKK 2.2.1.1	Jumlah PAUD Penggerak	23.751.50	30.876.95	40.140.04
SK	Meningkatnya pembelajaran pendidikan masyarakat dan pendidikan khusus yang berkualitas			
IKK 2.2.1.5	Jumlah SLB Penggerak	7.540.00	9.802.00	12.742.60
SP	Meningkatnya kualitas dan kemanfaatan hasil assessment untuk praktik pembelajaran			
IKP 2.2.7	Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan profil dan rapor pendidikan untuk mendukung perbaikan pembelajaran			
SK	Meningkatnya pembelajaran PAUD yang berkualitas			
IKK 2.2.7.1	Persentase satuan PAUD yang mendapatkan pembinaan peningkatan mutu pembelajaran			

IKK 2.2.7.2	Persentase satuan PAUD yang menggunakan perangkat pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran berkualitas	128.625.00	171.500.00	343.000.00
SK	Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen			
IKK 2.2.7.11	Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	51.015.26	66.319.84	86.215.80
IKK 2.2.7.12	Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	60.385.42	78.501.04	102.051.35

4.4 Kerangka Pendanaan Pencapaian Indikator Kinerja Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur

No	Nomenklatur	Kode	Nama Satker / Unit / Program / Kegiatan / KRO / Rincian Output / Komponen / Sumber Dana	Satuan	T.A. 2023		T.A. 2024		T.A. 2025		T.A. 2026	
					Volume	Alokasi	Volume	Alokasi	Volume	Alokasi	Volume	Alokasi
1	Satker	417799	LPMP KALIMANTAN TIMUR			42.663.759	42.663.759	42.663.759	42.663.759	42.663.759	42.663.759	42.663.759
2	Unit	03	DITJEN PENDIDIKAN PAUD, DASAR DAN MENENGAH			42.663.759	42.663.759	42.663.759	42.663.759	42.663.759	42.663.759	42.663.759
3	Program	03.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran			14.993.057	14.993.057	14.993.057	14.993.057	14.993.057	14.993.057	14.993.057
4	Kegiatan	6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas			14.993.057	14.993.057	14.993.057	14.993.057	14.993.057	14.993.057	14.993.057
5	Sasaran	6397.01	Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen									
6	Indikator	6397.01.02	Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	%	30		35		40		45	
7	KRO	6397.Q0B	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Lembaga	11	14.993.057	11	14.993.057	11	14.993.057	11	14.993.057
8	RO	6397.Q0B.750	Satuan Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi penjaminan mutunya	Lembaga	11	14.993.057	11	14.993.057	11	14.993.057	11	14.993.057
9	Komponen	6397.Q0B.750-063	Pendampingan Fasilitasi Berdasarkan SNP			14.993.057	14.993.057	14.993.057	14.993.057	14.993.057	14.993.057	14.993.057

BAB V

PENUTUP

Rencana strategis BPMP Kalimantan Timur yang disusun ini pada dasarnya merupakan alat untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis badan serta target yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi lembaga sebagaimana diamanatkan dalam Permendikbudristek RI No. 11 Tahun 2022. Dengan disusunnya Renstra ini, diharapkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPMP akan lebih efektif, efisien, berorientasi ke masa depan dengan memperhatikan permasalahan dan kondisi saat ini yang dihadapi satuan kerja baik internal maupun eksternal. Penyusunan Renstra adalah salah satu wujud pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Dari ditetapkannya rencana strategis Balai maka akan dapat dilakukan penilaian kinerja berupa pengukuran kinerja yaitu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi Lembaga. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan strategis lembaga.

Rencana Strategis BPMP Kalimantan Timur ini diharapkan untuk digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasardan pendidikan menengah yang hendak dicapai pada periode 2020 – 2024 ataupun sebagai pedoman dalam menyusun (1) Rencana Kerja (Renja) dan RKA-KL; (2) Rencana/Program Pembangunan bidang anak usia dini, pendidikan dasardan pendidikan menengah;(3)Koordinasi perencanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan lingkup anak usia dini,pendidikan dasar dan pendidikan menengah; (4) Laporan Tahunan;(5)Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Semoga Rencana Strategis ini dapat membantu BPMP Kalimantan Timur, untuk melakukan sinkronisasi rencana dengan pelaksanaan dalam upaya melakukan penjaminan mutu pendidikan di propinsi yang berkarakter dan berdasarkan asas gotong royong.

DAFTAR PUSTAKA

1. Rencana Strategis 2020-2024 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi
2. Rencana Strategis 2020-2024 Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2022.
4. Panduan Praktis Penyusunan Rencana Strategis UPT
5. APLIKASI Simpeg,data kepegawaian

LAMPIRAN

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Target	Alokasi (Rp Miliar)	Unit Pelaksana
			2020	2020	
IKK	Jumlah guru dan tenaga kependidikan DIKMEN yang meningkat kinerja dan karirnya	orang	71.637		
IKK	Jumlah guru dan tenaga kependidikan PAUD yang menerima penghargaan dan perlindungan	orang	678		
IKK	Jumlah guru dan tenaga kependidikan DIKDAS yang menerima penghargaan dan perlindungan	orang	941		
IKK	Jumlah guru dan tenaga kependidikan DIKMEN yang menerima penghargaan dan perlindungan	orang	881		
5634; 4271	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan			1.093,36	Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
SK	Meningkatnya Kompetensi guru dan tenaga kependidikan				
IKK	Jumlah guru yang mengikuti pelatihan guru penggerak	orang	10.000		
4271	Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan			1.166,36	Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan
SK	Meningkatnya kompetensi dan kualifikasi guru dan tenaga kependidikan				
IKK	Jumlah guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah bersertifikat	orang	20.000		
IKK	Jumlah guru dan tenaga kependidikan berkualifikasi minimal S1	orang	400		
5635	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan			560,13	Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan				
IKK	Rata-rata predikat Satker minimal BB	predikat	BB		
IKK	Jumlah Satker yang dibina menuju WBK	satker	1		
IKK	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	nilai	93		
023.03.06	Program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah			6.050,60	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Target	Alokasi (Rp Miliar)	Unit Pelaksana
			2020	2020	
IKP 3.2.2	Jumlah satuan pendidikan menjadi Sekolah Penggerak	satuan pendidikan	-		
SP 3.3	Meningkatnya kualitas pembelajaran pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah				
IKP 3.3.1	Persentase tingkat pencapaian perkembangan anak usia 5-6 tahun berkembang sesuai harapan	%	58,68		
IKP 3.3.2	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	%	57,20		
IKP 3.3.3	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	%	26,50		
SP 3.4	Meningkatnya karakter peserta didik				
IKP 3.4.1	Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	30		
IKP 3.4.2	Persentase siswa dengan nilai Survei Karakter memenuhi tingkat minimum	%	57,20		
SP 3.5	Terwujudnya pengelolaan pendidikan yang partisipatif, transparan dan akuntabel pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah				
IKP 3.5.1	Persentase satuan pendidikan yang memperoleh BOS dan melaporkan tepat waktu	%	50		
IKP 3.5.2	Persentase satuan pendidikan yang melakukan penerapan BOS Non-Tunai	%	1,80		
IKP 3.5.3	Persentase prov/kab/kota yang mempertimbangkan Neraca Pendidikan Daerah (NPD) sebagai dasar pengambilan keputusan	%	55		
IKP 3.5.4	Persentase data polok PAUD, Dikdas, dan Dikmen yang akurat, terbaru dan berkelanjutan	%	95		
SP 3.6	Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah yang berkualitas				
IKP 3.6.1	Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah minimal BB	predikat	BB		
IKP 3.6.2	Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBEM	satker	11		
4272	Penyediaan Layanan PAUD			358,60	Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini
SK	Tersedianya layanan PAUD yang merata dan berkualitas				
IKK	Jumlah peserta didik usia 3-6 tahun yang mengikuti menerima BOP PAUD	juta orang	7,48		

C. Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2022 - 2024

Kode	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline				Target				Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2024					
SS 1	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang														
IKSS 1.1	Angka Ketidaksihan Sekolah	%	74,96	75,30	75,59	75,79									BPS
IKSS 1.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun	%	99,26	99,30	99,32	99,34									BPS
IKSS 1.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun	%	95,74	96,14	96,34	96,55									BPS
IKSS 1.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat	%	84,53	88,39	92,80	95,00									BPS
IKSS 1.5	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi	%	30,85	31,52	36,64	37,53									BPS
SS 2	Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) dan relevansi di seluruh jenjang														
IKSS 2.1	Nilai kualitas lingkungan belajar PAUD	Nilai	0,49	0,51	0,52	0,53									BAN PAUD
IKSS 2.2	Proporsi peserta didik yang memiliki nilai di atas batas minimum dalam asesmen kompetensi minimum														Inventori Data Hasil Asesmen Nasional
	a. Literasi	%	43,00	47,50	49,75	52,00									
	b. Numerasi	%	22,90	28,30	29,20	30,10									

Kode	Sasaran Program (Outcome// Sasaran Kegiatan/Indikator)	Satuan	Baseline				Target				Alokasi (dalam juta ru	
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2023		
IKSS 5.3	Predikat SAKIP Kemendikbudristek	Predikat	BB	BB	A	A						
IKSS 5.4	Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek	Indeks	78	83	85	87						
Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Wajib Belajar 12 Tahun												
SP	Meningkatnya partisipasi pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah											
IKP 1.1.1	Persentase Kab/Kota dengan Angka Ketidaksihan Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 tahun diatas 75	%	63,42	63,81	64,20	64,59	6.268,85	6.502,29				
4272	Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini											
SK	Tersedianya layanan PAUD yang merata dan berkualitas											
IKK 1.1.1.1	Jumlah satuan PAUD menerima program afirmasi	Lembaga	-	105	108	110	6.268,85	6.502,29				
IKP 1.2.1	Persentase Kab/kota dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun diatas 99%	%	76,85	77,82	78,40	78,65	34.375,77	36.094,56				

upiah)	Unit Pengampu	Sumber Data
2024		Surat Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh KemenPAN
		Surat Menteri PANRB tentang hasil FMPRB Kemendikbud
6.911,40	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	BPS
6.911,40	Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini	APBN
37.899,29	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	BPS

Kode	Sasaran Program (Outcome/ Sasaran Kegiatan/Indikator)	Satuan	Baseline		Target		Alokasi (dalam juta ru- piah)		Unit Pengampu	Sumber Data	
			2020	2022	2023	2024	2022	2023			2024
SK	Meningkatnya pembelajaran Sekolah Menengah Atas yang berkualitas										
IKK 2.2.1.4	Jumlah SMA Penggerak	Lembaga	-	980	1.450	1.936	10.925,11	24.602,64	21.983,44	Direktorat Sekolah Menengah Atas	Database Sekolah Penggerak
4463	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus										
SK	Meningkatnya pembelajaran Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus yang berkualitas										
IKK 2.2.1.5	Jumlah SLB Penggerak	Lembaga	-	105	263	341	7.540,00	9.002,00	12.742,60	Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus	Database Sekolah Penggerak
IIP 2.2.2	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran paradigma baru	%	-	2,14	3,32	4,49	91.670,44	119.101,97	154.936,57	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	Dapodik
4459	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini										
SK	Meningkatnya pembelajaran PAUD yang berkualitas										
IKK 2.2.2.1	Persentase satuan PAUD yang menerapkan pembelajaran paradigma baru	%	-	0,98	1,54	2,11	27.431,68	35.661,10	46.359,53	Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini	Dapodik yang diolah
4460	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Dasar										

Kode	Sasaran Program (Outcome/ Sasaran Kegiatan/Indikator)	Satuan	Baseline		Target		Alokasi (dalam juta ru- piah)		Unit Pengampu	
			2020	2022	2023	2024	2022	2023		2024
IKK 2.2.5.2	Jumlah penelitian bidang Biologi Tropika yang dikembangkan bersama satuan pendidikan di kawasan Asia Tenggara	Penelitian	20	20	22	22	1.666,00	1.716,00	1.767,00	SEAMEO BIOTROP
SK	Terseleenggaranya pengembangan pendidikan, sains, budaya dan kerja sama di kawasan Asia Tenggara									
IKK 2.2.5.3	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dijadikan model dalam mengimplementasikan inovasi/pengembangan pendidikan bidang Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Bahasa di kawasan Asia Tenggara	Orang	1.972	3.510	3.700	3.900	3.549,00	3.655,00	3.765,00	SEAMEO QITEP
SK	Terseleenggaranya pengembangan pendidikan, sains, budaya dan kerja sama di kawasan Asia Tenggara									
IKK 2.2.5.4	Jumlah Lembaga yang dijadikan model pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Keluarga di Kawasan Asia Tenggara	Lembaga	15	15	17	17	1.097,00	1.130,00	1.164,00	SEAMEO CECCEP
SP	Meningkatnya kualitas dan kemandirian hasil asesmen untuk praktik pembelajaran									
IIP 2.2.6	Persentase Pendidik dan Peserta Didik yang memanfaatkan Platform Digital Pendidikan	%	-	15,00	20,00	30,00	258.685,49	266.447,00	274.440,00	Sekretariat Jenderal

Rpiah)	Unit Pengampu	Sumber Data	Kode	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Target				Alokasi (dalam juta ru	
						2020	2022	2023	2024	2022	2023
2024											
3.651.964,81	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	Profil dan Rapor Pendidikan	IKP 2.2.7	Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan profil dan rapor pendidikan untuk mendukung perbaikan pembelajaran	%	-	25	50	75	3.344.961,43	3.428.924,07
			4459	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini							
			SK	Meningkatnya pembelajaran PAUD yang berkualitas							
61.914,83	Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini	Laporan Internal	IKK 2.2.7.1	Persentase satuan PAUD yang mendapatkan pembinaan peningkatan mutu pembelajaran	%	-	0,98	1,54	2,11	36.636,00	47.626,80
343.000,00	Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini	Dapodik yang diolah	IKK 2.2.7.2	Persentase satuan PAUD yang menggunakan perangkat pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran berkualitas	%	9,54	10,21	10,88	12,23	128.635,00	171.500,00
			4460	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Dasar							
			SK	Meningkatnya pembelajaran sekolah dasar yang berkualitas							
52.032,94	Direktorat Sekolah Dasar	Laporan Internal	IKK 2.2.7.3	Persentase SD yang mendapatkan pembinaan peningkatan mutu pembelajaran	%	-	2,78	4,34	5,90	30.788,72	40.025,34
2.828.250,00	Direktorat Sekolah Dasar	Dapodik yang diolah	IKK 2.2.7.4	Persentase SD yang menggunakan perangkat pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran berkualitas	%	25,83	44,33	59,49	74,66	2.828.250,00	2.828.250,00
			4461	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama							

Kode	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline		Target		Alokasi (dalam juta ru			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
IKK 2.2.7.6	Persentase SMP yang menggunakan perangkat pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran berkualitas	%	68,37	87,37	90,78	94,18	175.625,00	175.625,00	175.625,00	Direktorat Sekolah Menengah Pertama	Dapodik yang diolah
4462	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Menengah Atas										
SK	Meningkatnya pembelajaran sekolah menengah atas yang berkualitas										
IKK 2.2.7.7	Persentase SMA yang mendapatkan pembinaan peningkatan mutu pembelajaran	%	-	7,01	10,48	13,85	26.663,00	34.663,05	45.061,96	Direktorat Sekolah Menengah Atas	Laporan Internal
IKK 2.2.7.8	Persentase SMA yang menggunakan perangkat pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran berkualitas	%	79,43	91,88	95,78	99,68	68.125,00	68.125,00	68.125,00	Direktorat Sekolah Menengah Atas	Dapodik yang diolah
4463	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus										
SK	Meningkatnya pembelajaran pendidikan masyarakat dan pendidikan khusus yang berkualitas										
IKK 2.2.7.9	Persentase Lembaga Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus yang mendapatkan pembinaan peningkatan mutu pembelajaran	%	-	8,33	11,70	15,18	10.226,00	13.293,80	17.261,94	Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus	Laporan Internal
IKK 2.2.7.10	Persentase SLB yang menggunakan perangkat pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran	%	11,88	13,90	13,90	13,90	7.375,00	7.375,00	5.500,00	Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus	Dapodik yang diolah

Kode	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline		Target		Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
HKX 2.2.7.11	Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	%	-	0,98	1,96	3,92	51.015,26	66.319,04	86.215,80	Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	UPT Ditjen Paudnasmen
HKX 2.2.7.12	Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	%	-	25,00	30,00	35,00	60.385,42	78.501,04	102.051,35	Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	UPT Ditjen Paudnasmen
SP	Terwujudnya Buku yang Berkualitas										
HKP 2.2.6	Jumlah buku yang berkualitas dan memenuhi standar	Buku	449	2600	2060	3289	57.020,00	58.731,00	60.493,00	Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan	Laporan Tahunan
6695	Pengembangan Perbukuan										
SK	Tersedianya Buku Pendidikan dan SDM yang Berkualitas										
HKX 2.2.8.1	Jumlah buku pendidikan yang berkualitas dan memenuhi standar	Buku	1.952	2.550	2.805	3.226	51.434,00	52.977,02	54.566,33	Pusat Perbukuan	Laporan Pelaksanaan & Ketetapan Menteri
HKX 2.2.8.2	Jumlah buku umum pendidikan yang berkualitas dan memenuhi standar	Buku	0	50	55	63	2.913,00	3.000,39	3.090,40	Pusat Perbukuan	Laporan Pelaksanaan & Ketetapan Menteri
HKX 2.2.8.3	Jumlah SDM perbukuan yang meningkat kompetensinya	Orang	250	432	732	942	2.673,00	2.753,19	2.835,79	Pusat Perbukuan	Laporan Internal
SP	Meningkatnya mutu pendidikan melalui penjaminan mutu pendidikan										

Kode	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline		Target		Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
HKX 3.2.6.2	Jumlah partisipan perlindungan budaya dan sastra daerah	Orang	6.842	12.383	15.405	19.193	9.361,00	12.509,00	15.843,00	Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Laporan Internal
Program Dukungan Manajemen											
SP	Terwujudnya tata kelola Kemendikbudristek yang berkualitas										
HKP 5.1.1	Indeks akuntabilitas tata kelola keuangan dan BMN	Indeks	Baik	Baik	Baik	Baik	42.330,00	43.600,00	44.909,00	Sekretariat Jenderal	Capaian kinerja Biro Keuangan & BMN
1983	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Pengelolaan Anggaran dan Barang Milik Negara										
SK	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan Barang Milik Negara										
HKX 5.1.1.1	Persentase outlier tertib pengelolaan anggaran	%	72,69	85	90	93	29.516,00	30.401,00	31.314,00	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	Laporan Money Tindak Lanjut LHP, mlk.kemdikbud.go.id, Laporan hasil penilaian kinerja outlier BLU
HKX 5.1.1.2	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan perundang-undangan	Laporan	22	22	22	22	4.233,00	4.360,00	4.491,00	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	Laporan Keuangan Biro Keuangan dan BMN,
HKX 5.1.1.3	Persentase outlier tertib pengelolaan BMN	%	72	85	90	95	8.501,00	8.839,00	9.104,00	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	simas.kemdikbud.go.id, SIMAN, kertas kerja penilaian BMN
									5.268,05	Inspektorat Jenderal	Hasil Review LK

Kode	Sasaran Program (Outcome// Sasaran Kegiatan/Indikator)	Satuan	Baseline				Target				Alokasi (dalam jutaan Rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024			
SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen														
IKX 5.3.6.1	Persentase Satuan Di Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen yang memiliki predikat SAKIP minimal A	%	39	44	47	50	110.207,35	143.373,56			186.385,62		Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	Laporan hasil evaluasi SAKIP	
IKP 5.3.7	Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Volkasi	Predikat	A	A	A	A	135.034,21	135.034,21			135.034,21		Direktorat Jenderal Pendidikan Volkasi	Laporan hasil evaluasi SAKIP	
4261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pendidikan Volkasi														
SK	Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Volkasi														
IKX 5.3.7.1	Persentase satuan di Ditjen Pendidikan Volkasi yang memiliki predikat SAKIP minimal BB	%	46,15	66,46	79,75	96	135.034,00	135.034,00			135.034,00		Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Volkasi	Laporan hasil evaluasi SAKIP	
IKP 5.3.8	Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi	Predikat	A	A	A	A	27.865,00	28.515,00			29.371,00		Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi	Laporan hasil evaluasi SAKIP	
4257	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi														
SK	Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi														

Lampiran : Definisi Operasional Indikator Kinerja

Indikator Kinerja 1.1

Program	:	Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
SK	:	Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen
IKK	:	2.2.7.11. Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya
Definisi:		
Persentase dari satuan paud dan dikmas di wilayah masing masing yang memiliki mutu pembelajaran lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya berdasarkan hasil rapor pendidikan atau survey lingkungan belajar.		
Metode Penghitungan:		

$$= \frac{\text{Jumlah Satuan PAUD dan Dikmas yang rapor pendidikan atau survey lingkungan belajar meningkat}}{\text{Jumlah Satuan PAUD dan Dikmas pada Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan}} \times 100\%$$

Satuan	:	Persen (%)
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Sumber Data	:	UPT Ditjen Pauddasmen
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Indikator Kinerja 1.2

Program	: Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
SK	: Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen
IKK	: 2.2.7.12. Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)
Definisi:	
Persentase dari provinsi/kabupaten/kota di wilayah masing masing yang memiliki rapor pendidikan lebih tinggi dibandingkan rapor pendidikan tahun sebelumnya.	
Metode Penghitungan:	

$$= \frac{\text{Jumlah Satuan Dikdas dan Dikmen yang rapor pendidikannya meningkat}}{\text{Jumlah Satuan Dikdas dan Dikmen pada provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan}} \times 100\%$$

Satuan	: Persen (%)
Tipe Penghitungan	: Nonkumulatif
Unit Pelaksana	: Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Sumber Data	: UPT Ditjen Paudnasmen
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Periode Pengumpulan Data	: Tahunan

2.1. Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur

Definisi:

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal ((RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 299 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, unit kerja, dan satuan kerja (unit kerja mandiri). Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Evaluasi atas penerapan SAKIP pada seluruh instansi pemerintah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RB). Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government).

Metode Perhitungan:

Pelaksanaan Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Nilai SAKIP = (Perencanaan Kinerja) + (Pengukuran Kinerja) + (Pelaporan Kinerja) + (Evaluasi Kinerja)

Dari hasil nilai, akan dikategorikan pada Predikat Penilaian SAKIP

Nilai	Predikat	Interpretasi
> 90 - 100	AA	Sangat Memuaskan
> 80 - 90	A	Memuaskan
> 70 - 80	BB	Sangat Baik
> 60 - 70	B	Baik
> 50 - 60	CC	Cukup (memadai)
> 30 - 50	C	Kurang
0 - 30	D	Sangat Kurang

2.2. Nilai Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan RKAKL

Definisi:

Kinerja anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga.

Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Berdasarkan PMK Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian dan analisis atas kinerja anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja anggaran.

Metode Perhitungan:

Untuk menghitung nilai kinerja anggaran dan pelaksanaan RKA-K/L digunakan rumus berikut ini:

Nilai Kinerja Anggaran = (60% x Nilai EKA) + (40% x Nilai IKPA)

